

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan PT. Bank Syariah Mandiri

4.1.1.1 Sejarah Perusahaan

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan

melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

4.1.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha.

2. Misi

- a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
- b) Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.

- c) Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
- d) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
- e) Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

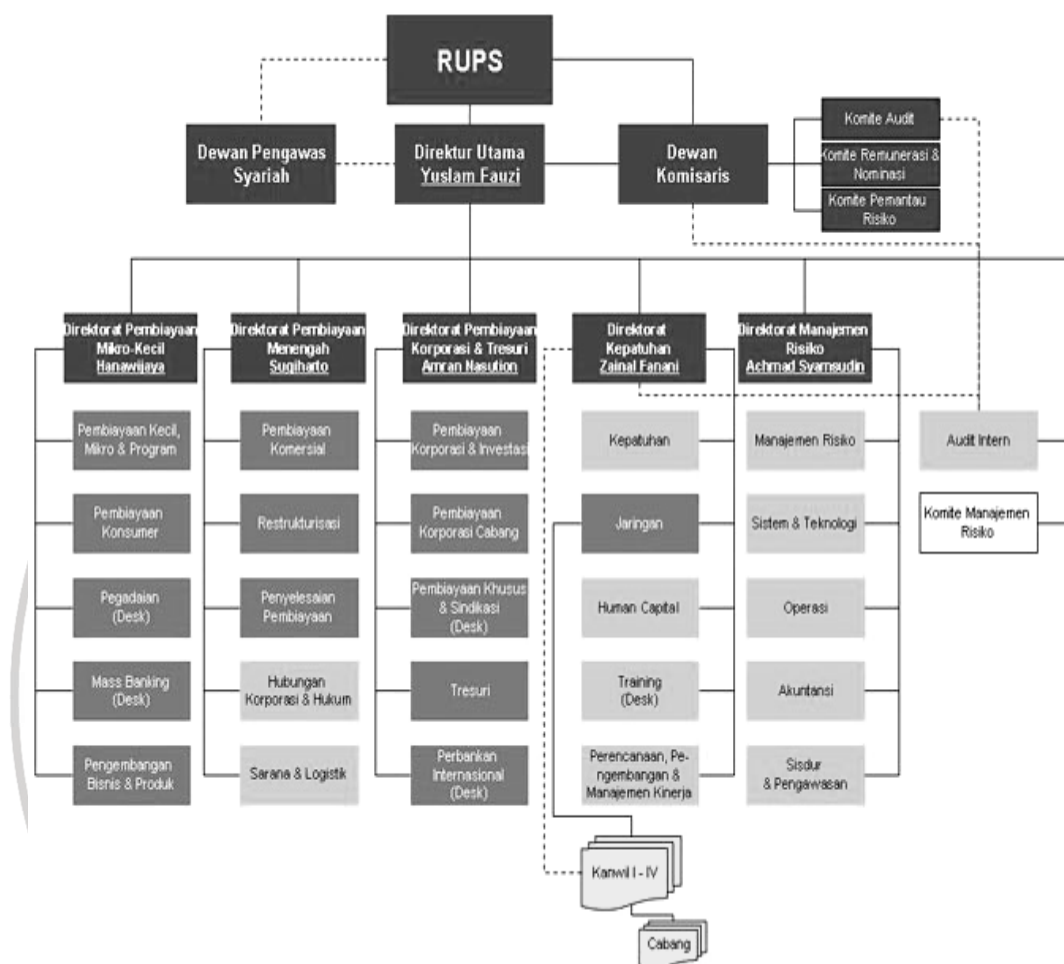
4.1.1.3 Shared Values

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut *Shared Values* Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* Bank Syariah Mandiri disingkat “ETHIC”.

1. Excellence: Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.
2. Teamwork: Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.
3. Humanity: Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius.
4. Integrity: Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji.
5. Customer Focus: Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

4.1.1.4 Organisasi dan Manajemen

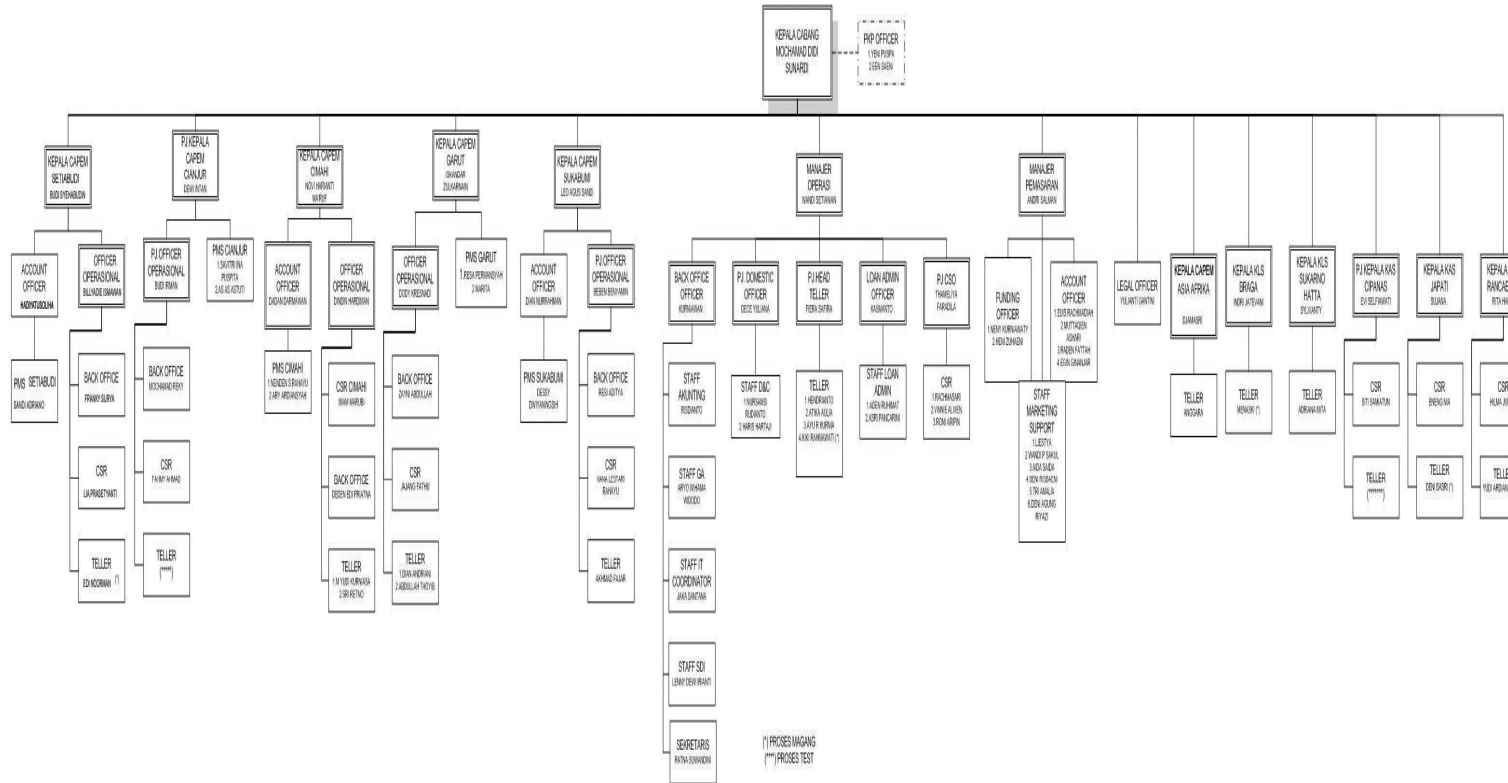
Berikut adalah struktur organisasi Bank Syariah Mandiri secara umum :



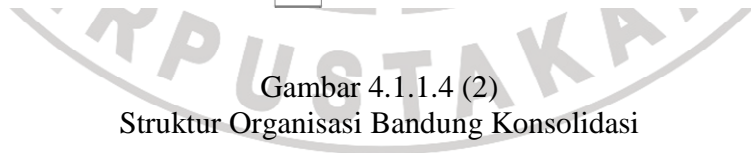
Gambar 4.1.1.4 (1)
Struktur umum organisasi Bank Syariah Mandiri

Sedangkan struktur organisasi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Utama Bandung adalah:

STRUKTUR ORGANISASI BANDUNG KONSOLIDASI



Gambar 4.1.1.4 (2)
Struktur Organisasi Bandung Konsolidasi



4.1.2 Deskripsi Masalah Penelitian

Sebelum mendeskripsikan masalah penelitian, peneliti secara langsung melakukan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan juga metode dokumenter. Wawancara dilakukan dengan penentuan sumber data berdasarkan teknik *probability sampling*, dimana sumber data dipilih karena berkecimpung secara langsung dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) pada Bank Syariah Mandiri.

Sementara itu, metode dokumenter digunakan untuk menganalisis laporan CSR pada Bank Syariah Mandiri dengan merujuk kepada kesesuaian terhadap ketentuan laporan CSR yang dibuat oleh Global Reporting Initiative (GRI).

Setelah penelitian dilakukan, maka data hasil penelitian wawancara dikelompokkan dan dipaparkan dalam sub bab selanjutnya dimana data tersebut diberi kode sesuai masing-masing permasalahan. Kode PLK digunakan untuk data atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program CSR pada Bank Syariah Mandiri. Sedangkan, kode PLP digunakan untuk data atau informasi yang berkaitan dengan pelaporan program CSR pada Bank Syariah Mandiri.

4.1.2.1 Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Syariah Mandiri (BSM)

BSM merupakan bank yang berpedoman pada hukum Islam dalam menjalankan bisnisnya walaupun masih belum sepenuhnya. Dalam ketentuan Islam,

pelaksanaan CSR dapat dilihat dari hasil wawancara singkat dengan praktisi ekonomi

Islam :

“Dalam Islam itu tidak ada dasar tentang CSR, yang ada hanya sedekah, karena menurut Islam CSR itu termasuk sedekah. Permasalahannya kan dalam Islam, sedangkan ini bukan Negara Islam, karena bukan Negara Islam maka disebutlah CSR, kalau dalam Islam kan bisa wakaf, sedekah, bisa macam-macam infaq, cuma karena namanya dari barat tetap saja kita mengikuti aturan dari barat, itu kesalahannya, kenapa kita tidak PD membuat konsep baru, jadi kalau kita jadi *follower* yah beginilah resikonya, makanya jadi pemimpin, dimodifikasi peraturannya, cuma yang modifikasi siapa, pada males Negara kita, maunya yang gampang. Seharusnya kita bikin, mulai dari Bank-Bank kan banyak di kita, kita modifikasi semuanya ga usah pake nama Bank, ganti jadi Lembaga Pembiayaan misalnya, kita bikin aturan baru, tapi kan karena mereka sudah mapan karena system mereka sudah banyak itu yang kita adopsi, modifikasi. Jadi aturan-aturan yang baiknya kita ikutin, kan Islam itu tidak kaku. Makanya kalau bisa tugas kita adalah bikin yang seperti itu, sehingga lebih menantang, memang agak berat, tapi itu bisa lebih bermanfaat, bukan sekarang karena Negara kita tidak pro, pasti ga bakal diikuti, Negara kita mah masa bodo, sukanya yang impor semua, padahal orang kita pintar.”

Program Corporate Social Responsibility (CSR) mulai dilaksanakan pada Bank Syariah Mandiri (BSM) sekitar tahun 2001, yaitu setelah dua tahun berdiri dengan motivasi menjaga nama baik BSM dan untuk membantu sesama baik itu dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan. Tujuan BSM dalam melaksanakan program CSR dikutip dari *official web* BSM adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan;
- b. Mendukung implementasi praktik bisnis yang transparan dan bertanggungjawab;
- c. Membuat perubahan positif di tengah masyarakat, khususnya di lingkungan di mana BSM beroperasi;
- d. Membangun citra positif BSM dalam benak masyarakat, dan menggali dukungan masyarakat untuk tujuan bisnis BSM;
- e. Meningkatkan nilai *brand* BSM dengan membangun reputasi yang baik;

- f. Meningkatkan kesadaran publik tentang BSM melalui kegiatan-kegiatan sosial.

CSR bagi BSM diposisikan sebagai strategi inti (*core strategy*) dan menjadikannya sebagai sumber inovasi dan efisiensi untuk meningkatkan keunggulan bersaing (*competitive advantage*) perusahaan. CSR menurut BSM merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan semua *stakeholders*, termasuk pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik, pemerintah, *supplier* bahkan kompetitor. CSR merupakan konsep di mana BSM secara sukarela menyumbangkan sesuatu ke arah masyarakat yang lebih baik dan lingkungan hidup yang lebih bersih.

Dalam pelaksanaannya, BSM bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM). Dimana lembaga ini dibentuk oleh Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat) yang berdiri berdasarkan Akta Notaris Agus Madjid SH. tanggal 21 November 2001 Nomor 85. Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 406 tahun 2002 tanggal 17 September 2002. Lebih jelasnya mengenai status LAZNAS BSM berdasarkan pengakuan koordinator LAZ di cabang utama Bandung adalah sebagai berikut:

“LAZ dulu belum, belum lembaga amil zakat. Masih dalam lingkungan itu. Sekarang udah misah. Jadi sekarang itu jadi yayasan..euu apa ya?. Sejahtera..duh, lupa euy. Itu saya ada buku itu nya. Itu terpisah tapi memang sebagian..ummh, baik itu pengawas maupun pengurusnya termasuk..euu salah satu anggota direksi BSM juga ada dan jadi direktornya salah satu pegawai BSM juga. Seperti itu”

Berikut keterangan lebih lanjut dari koordinator LAZ mengenai keterkaitan LAZNAS BSM dengan BSM:

“hmmph, LAZ itu kan salah satu lembaga amil zakat nasional ya. Itu sekarang udah di...eeuu..apa...berdiri sendiri dengan nota..apa istilahnya..akte notaris tersendiri sejak tanggal berapa gitu ada kemaren kalau seandainya itu saya bawa mah ada disitu. Kalau saya menjelaskan saya takut salah. Ada keterkaitan sama BSM itu memang kayanya satu kesatuan soalnya dana yang dihimpun itu pertama..eeuu..dana..apa..zakat perusahaan BSM sebagian masuk kesitu, yang keduanya juga dana zakat antar karyawan dan karyawan BSM itu juga dimasukkan kesit. Bahkan kalau di BSM itu diwajibkan yang masuk ke..mau jadi calon pegawai BSM itu ya, karyawan maupun karyawan itu udah ada komitmen menandatangani disitu bahwa 2,5% dari gaji yang akan didapat dari BSM itu bersedia dimasukkan kedalam rekening LAZ. Maksud dan tujuan daripada LAZ itu tujuannya untuk CSR itu ya”

Dana yang ada pada rekening LAZNAS BSM diperuntukkan untuk 3 program unggulan yang dikutip dari *official web* BSM :

- a. Program Mitra Umat: berfokus pada pemberdayaan umat melalui bantuan modal kerja yang disalurkan kepada pedagang kecil atau usaha kecil-mikro (UKM). Bila usaha sudah berkembang, maka dana tersebut akan digulirkan kembali kepada individu/pihak lain yang membutuhkan. Individu yang sudah berhasil mengembangkan usahanya, wajib menjadi pembayar zakat (*Muzakki*).
- b. Program Didik Umat: berfokus kepada penyaluran bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada anak-anak kaum dhuafa atau yang berhak menerima zakat agar bisa melanjutkan sekolah.
- c. Program Simpati Umat: berfokus pada kegiatan yang bersifat charity, di antaranya; bantuan atau dana zakat yang digulirkan secara langsung kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat, maupun masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk berobat atau korban bencana alam.

Didukung oleh keterangan koordinator LAZ mengenai program LAZ dan proses pelaksanaannya :

“Kalau disitu terdiri didalam rekening itu kalau tidak salah ada istilahnya untuk komposisi dari itu. Tu pertama ada digunakan untuk namanya Mitra Umat. Mitra umat itu kita membantu...euuu...apa...perorangan maupun suatu kelompok untuk diberikan modal untuk supaya istilahnya..apa yaa..membantu ekonomi masyarakat bisa mandiri gitu tujuannya..apa ya..seperti itu.. Soalnya kadang-kadang masyarakat kecil itu memerlukan dana untuk usaha baik itu perorangan maupun kelompok dan juga untuk membentengin dan mencegah..euu..apa..jaman sekarang istilahnya rentenir gitu ya...supaya menjauhi sperti itu. Makanya dulu BSM, LAZ itu ada semacam pinjaman Qardhul Hasan. Qardhul Hasan itu jadi keperluannya berapa itu juga memang perlu dianalisa juga. Modal misalnya untuk pembelian investasi, beli misalnya kayak tukang gorengan ya..beli peralatannya..beli apanya gitu. Nanti kita beli disitu. Yaa, jadi petugas bukan BSM nya, dari petugas LAZNAS. Kita survei dulu ke tempat itu..euuu...betul tidak. Kalau sudah layak, kita bikin analisa. Bapak perlunya modal berapa trus apa aja yang diperlukan. Kalau sudah sesuai kita ajukan ke komite dalam hal kalau di cabang itu pengelola, petugas pengelola itu dan diketahui oleh manajer operasional sama kepala cabang, seperti itu. Kalau dulu itu pinjaman Qardhul hasan itu tanpa dikenakan margin kelebihan jadi misalnya yang bersangkutan itu meminjam satu juta nanti kita kasih jangka waktu misalnya supaya gampang, 10 bulan jadi satu bulannya 100 ribu..100ribu, gitu sampai jadi 10 gitu. Tapi setelah kesini itu ada kebijakan baru lagi bahwa Qardhul Hasan sistemnya dihapus, tidak ada Qardhul Hasan. Ya, Qardhul Hasan itu justru namanya itu..seakan-akan kayak dihibahkan tapi tetep kalau saya memberikan itu seakan-akan pinjam. Maksud dan tujuan saya supaya mengajari orang tersebut supaya bertanggungjawab. Nanti kalau dari awal saya berikan begitu aja. Wah, enak kita gak ada tanggungjawab ya..gitu ya nisa ya. Jadi nanti, euuu..misalnya persetujuan tapi tetep koordinator LAZ di cabang mengusulkan ke kantor pusat nanti kantor pusat udah di acc, kita bikin kan semacam kayak surat SPDK, surat persetujuan pemberian pembiayaan, gitu untuk jangka waktu sekian. Trus, dan saya sarankan untuk membuka rekening di BSM. Maksud dan tujuan untuk supaya mudah untuk mengontrol bahwa tanggungjawab beliau itu seperti apa..bener ato tidak tiap bulannya misalnya saya tentukan seperti yang saya bilang tadi, tiap bulan 100rb...udah. Nanti pada saat jatuh tempo, itu uang kembali lagi. Yang bersangkutan misalnya mau itu. Pak saya akan mengajukan lagi, misalnya gitu. Ooo, rekeningnya kan udah ada. Nama itu kan namanya si mustahiq, misalnya udah satu juta. Okelah pak. Memang disarankan sama kantor pusatnya LAZ. Itu kan duitnya dia, pak. Ya, tapi dengan syarat sudah satu tahun cicilan itu. Lho?bukan, kalau sudah jatuh tempo nanti silahkan aja ambil lagi. Nah, gitu maksud dan tujuannya. Disamping itu kan juga dari segi ini, pertama, suatu pembelajaran dia supaya nabung. Keduanya, istilahnya kan semacam BSM kan nambah nasabah dan namanya mustahiq kecil itu untuk menghindari biaya administrasi..euu..buku tabungan tu kan 6 ribu. Saya bukakan aja tabunganku yang atau buku simpatik itu. Kan biaya bulanannya kecil. Itu dari segi mitra umat ya trus yang keduanya, LAZ itu mempunyai anggaran

yang namanya simpati umat. Simpati umat itu sifatnya kita bersimpati, kayak semacam CSR itu sifatnya macam-macam apalagi yang kayak ada bencana alam itu tidak terduga ya gitu. LAZ pusat selalu siap untuk ke sana dan juga membuka peluang untuk para donatur yang akan memasukkan dana itu ke rekening itu setelah terkumpul dan juga langsung terjun. Kayak kemaren di Pangandaran ya. Bahkan pak kasmanto dulu itu waktu tahun 2006 atau 2000 berapa waktu terjadi gempa itu langsung kesana terjun. Kita bawa peralatannya, kita bawa-bawa sembako, kita sumbangkan ke sana macam-macam. Itu yang namanya simpati umat ya. Dari beberapa komponen zakat itu dibagi tiga seperti itu. Trus yang ketiganya yang program semacam didik umat itu, membantu masyarakat, anak-anak bangsa yang mau meneruskan sekolah, pendidikan yang taraf ekonominya masih dibawah. Programnya kalau tahun ini baru satu tahun yang bisa diberikan..euummh...itu dari SD sampai SMU itu satu tahun..satu tahun. Nanti setelah satu tahun kita evaluasi lagi. Itu ada ketentuannya. Nanti kalau pas pendidikannya tu nilainya meningkat, insyaAllah bisa diajukan lagi satu tahun. Jadi pembayarannya pertriwulan, mulai tahun 2011 ini bandung juga mengajukan itu setiap masing-masing cabang dikasih kuota 50 anak. 50 anak didiknya terdiri dari SD,SMP dan SMU. Totalnya 50 aja. Cuman komposisi ininya kalo cabang bandung banyak dari SMP nya. Jadi ketentuan LAZ itu memberikan. Ya, sebetulnya sih belum besar ya. Kalau lagipula ya program pemerintah dari usia SD sampai SMP itu istilahnya ada BOSS. Jadi untuk SD itu ketentuannya untuk SD satu bulan 50 ribu. Itu dibayar pertriwulan atau tiap bulannya. Nanti kita mengajukan ke kantor pusat anak-anak didiknya berapa. Yang diajukan ke kantor pusat nanti setiap 3 bulan sekali didropping dan ada dikantor pusat sebelumnya sudah disetujui dulu,seperti itu. Yang SMP itu baru 80 ribu per bulan dapat santunan dari LAZ pusat”

Ketika pelaksanaan CSR, pihak BSM ikut terlibat seperti yang dikatakan koordinator LAZ :

“Kalau kita akan mengadakan CSR apalagi uangnya dari LAZ itu tentunya kita tidak lepas dari izin kepala cabang. Pak, pada tanggal sekian kami akan melakukan CSR. Sebagai penanggungjawab disitu adalah kepala cabang. Trus saya juga ada rekan-rekan yang lainnya nanti dalam pelaksanaanya kita membentuk panitia kecil. Gambaran strukturnya misalnya saya sebagai koordinator yang ditunjuk. Saya sebagai ketuanya. Sekretaris ini, bagian ini. Sekretaris ini, bagian ini. Jadi kita jalan, bareng. Seperti itu aja gak ribet”

Lebih lanjut lagi coordinator LAZ memberikan bayangan mengenai siapa yang terlibat dan proses terbentuknya panitia secara ringkas:

“Sebetulnya dari rekan-rekan kita, dari dalam juga kita melibatkan. Kan pelaksanaan itu istilahnya sekali-kali ya, jadi dimohon keikhlasannya rekan-rekan untuk membantu saya. Saya mau mengadakan contohnya kayak khitanan missal, yang bagian data anak-anak khitanan siapa..boleh. Langsung gitu aja nisa struktur organisasi mah. Nanti saya sebagai ketuanya saya langsung laporan pelaksanaan yang harus diketahui oleh kepala cabang. Seperti itu aja, gak ribet”

Prosedur pemilihan program CSR menurut coordinator LAZ dapat diambil berdasarkan pengajuan dari masyarakat.

“Woh, kalau itu sekarang makanya LAZ itu sekarang punya program sendiri-sendiri. Maksudnya program sendiri-sendiri itu terserah LAZ itu nanti program itunya. Tapi yang saya dengar, dapat informasi dari kantor pusat. Itu tiap hari itu kan melayani proposal ya yang masuk itu baik itu sumbangan apa. Yang tentunya berkaitan dengan sumbangan, seperti itu dan banyak LAZ yang telah di...yang telah dijalankan LAZ itu kayak contohnya kayak dari segi..apa ya..yang di bogor juga ada. Pertanian itu, pertanian jamur ato apa...secara kelompok, seperti gitu. Dikasih modal kelompok tani seperti itu..pertanian. Trus klo itu dilembang, dilembang itu juga ada itu perternak kelinci. Itu juga dapat bantuan dari itu. Atau betul aja yang disurvei emang betul, insyaAllah LAZ akan terjun. Jadi prosedurnya seandainya nisa misalnya punya ada salah satu kampung yang disitu itu emang ekonominya tidak bagus tapi ada yang mengelola. Ingin memajukan, ingin mengembangkan ekonomi umat yang disebelah..yang didaerah itu, ajukan aja proposal langsung ke LAZ pusat. Nanti insyaAllah dari petugas LAZ nanti ada yang survei. Memang betul, insyaAllah nanti bisa bekerjasama dalam bentuk; ini kekurangannya apa ini, dibikinkan. Gitu. Bahkan sampai ngeliat kondisi didaerah tertentu ada jembatan yang udah mau ambruk sedangkan itu teh untuk jalan umum atau apa, insyaAllah disitu akan dibangun. Trus sekolah-sekolah yang roboh, kadang-kadang didaerah terpencil kan itu..ni ya itu..ikut berpartisipasi disitu”

Selanjutnya, beliau menceritakan secara ringkas gambaran mekanisme survei sebelum pelaksanaan, dan selama pelaksanaan Mitra Umat.

“Ya itu kalo pengalaman saya yang dibandung kalo yang mengajukan itu betul-betul. Langkah pertama itu saya OTS dulu ya. Saya selidiki, saya survei. Betul bapak ibu keperluan ibu itu untuk modal ini, dagangnya apa. Jadi kita tidak bisa langsung ngasihkan gitu aja tapi kan ada istilahnya syarat-syaratnya ibu harus ni..nanti misalnya kayak dia ini..istilahnya membuka warung..kita ada fotonya kita dilampirkan nota analisa itu. Trus dari karakter manusianya, amanah

atau tidak disitu salah satu syarat. Salah satunya itu kita bisa informasi ke tetangga. Menanyakan kan keadaan...euu...bagaimana pak terhadap lingkungan orang tersebut, gini..gini. Kadang-kadang kalau orang yang positif baik kan tetep. Ooh bapak itu insyaAllah amanah lah...ini..ini. Kita bisa dapat itu dari tetangga, jadi kita langsung bertanya seperti itu aja. Sehubungan dengan tenaga yang kurang dan tenaga-tenaga ahlinya kurang di LAZ itu juga kadang-kadang mempercayakan itu aja, gitu aja. Tapi setiap saat pasti kita kontrol..gimana bu perkembangannya? silaturrahi secara itu kan ada ikatan emosional”

Mengenai porsi alokasi dana untuk setiap kegiatan CSR, koodinator LAZ mengatakan seperti ini :

“Kalau tidak salah itu terdiri dari tiga ini ya, ada untuk simpati umat, mitra umat, pendidikan. Alokasi dana itu yang untuk pos pendidikan itu 10 sampai 15 % dari total dana yang diterima oleh LAZ dan selebihnya berapa persen dari ini..berapa dari ini”

Lebih jelasnya beliau menerangkan tentang ada atau tidaknya ketetapan jumlah alokasi dana untuk tiap kegiatan CSR :

“Tapi kayaknya perhimpunan dana ini kan semakin manajemennya kan, LAZ nya kan semakin bagus. Ada perhitungan kayaknya, alokasi dana ini sekian..untuk ini sekian. Suatu perusahaan pun kan ada kan, misalnya pos biaya untuk pegawai sekian..ini sekian. LAZ itu juga punya pegawai juga kan, juga ada pos-pos untuk pembayaran hak amilnya juga ditujukan. Soalnya yang mengelola pun kalau ada kegiatan itu juga dapat kafalah dari kntor pusat. Kalau gak ada kegiatan ya gak ada. Kalau ada ya kita buat laporan, nanti dapat imbalan dari kantor pusat, namanya kafalah”

CSR pada BSM dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan pengakuan beliau :

“Kalau untuk itu sih, untuk pemberian itu sih selama ini sih saya tidak menggunakan seperti itu sih. Secara syariah yang namanya pemberian hibah kalau kayak apa..saya rasa kok saya belum tau juga ya. Misalnya memberikan sesuatu ada akadnya, yang jelas kalau dalam Islam kan memberikan sesuatu ada ijab kabulnya aja. Tidak ada yang tertulis kalau misalnya ini, cuma biasanya suka ada tanda terima lah kayak kita misalnya memberikan sumbangan kepada yatim piatu itu kan salah satu bentuk daripada administrasi kita bagus. Kan supaya nanti juga, itu kan LAZ juga diaudit..betul gak ininya, sesuai atau tidak. Ada diaudit juga”

Beliau juga menjelaskan tentang keberlanjutan dalam program CSR yang mereka lakukan disuatu daerah :

“Ohh, berkelanjutan, insyaAllah berkelanjutan. Misalnya di daerah sini. Ohh, kemaren maksud dan tujuan itu, kaya semacam apa ya. Sedikit-sedikit tapi supaya merata itu nisa. Misalnya ohh daerah CSR dibulan ini udah saya lakukan. Ohh disini lah muter ke kampung lainnya lagi. Misalnya bikin mck atau untuk itu. Seperti itu, jadi gak dikampung itu aja trus...gak. Kan pemerataan”

Pelaksanaan CSR memberikan pengaruh positif terhadap BSM, seperti yang dipaparkan oleh beliau :

“Dari segi positifnya yang jelas pasti ada lah. Apalagi kalau kita bicara dari segi bank istilahnya kan ada kepercayaan atau *trust*. Kalau bank sudah tidak dipercaya oleh masyarakat tentunya bagaimana. Makanya dengan adanya masyarakat menabung dan meng-ini, ada kepercayaan terhadap bank. Tentunya kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat dan simpati terhadap itu salah satunya sehingga Alhamdulillah kita dengan adanya CSR seperti ini, LAZnya Bank Syariah Mandiri itu. Ya, alhamdulillah sekarang udah berjalan hampir 12 tahun BSM itu ya dengan perkembangan, tau sendiri ya sangat signifikan. Berdiri KCP dimana-mana. Di Bandung aja dulu cuma ada di dago dan di cimahi aja, sekarang udah menyebar. Itu kemungkinan segi positifnya menjadikan rezeki manajemen kita berkah. Jadi dikasih kemudahan, seperti itu”

4.1.2.2 Pelaporan program CSR pada Bank Syariah Mandiri

Setelah melakukan wawancara singkat dengan mantan bagian accounting pada BSM cabang utama Bandung, beliau memberikan keterangan bahwa cabang tidak membuat laporan CSR secara langsung. Cabang hanya melakukan kegiatan CSR di lapangan, membuat liputan, mengambil foto kegiatan, dan membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan yang akan diserahkan ke kantor pusat.

Lebih jelasnya beliau menerangkan prosesnya secara singkat sebagai berikut :

“Setahu saya, cabang tidak menyusun laporan CSR secara langsung. Kami hanya ikut berpartisipasi di lapangan, membuat liputan, mengambil foto kegiatan, dan membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan yang kemudian diserahkan kepada kantor pusat. Setelah itu, kantor pusat mereview laporan dari cabang dan baru lah kantor pusat memasukkannya ke dalam laporan CSR”

Mengenai format laporan CSR, beliau berkomentar,

“Saya rasa mengenai laporan CSR yang disusun oleh BSM dari tahun ke tahun sama karena itu merupakan bagian dari laporan tahunan BSM. Dan laporan CSR sudah ada dilaporan tahunan sejak pertama kali dilaksanakannya program CSR karena ketika saya bergabung dengan BSM pada tahun 2008, laporan tersebut sudah ada”

Sedangkan, menurut praktisi ekonomi Islam mengenai pentingnya pelaporan CSR adalah sebagai berikut:

“Ya harus karena dengan adanya laporan kita bisa mengevaluasi, dalam Quran Surat Al Hasyr ayat 18 juga disebutkan “Hendaklah kita memperhatikan yang lalu untuk besok ” jadi yang lalu itu sama dengan kemarin, kita harus mencatatnya untuk esok hari, jadi kita harus punya *record*, dalam surat itu juga terdapat kata “Apabila kamu bermuamalah hendaklah dicatat” itu perintahnya, jadi selain untuk evaluasi bagi diri kita juga bisa meningkatkan kepercayaan untuk orang lain juga.”

Data hasil penelitian pada permasalahan penelitian ini lebih banyak diambil dengan metode dokumenter karena pada permasalahan ini peneliti lebih menitikberatkan mengenai analisis laporan CSR pada Bank Syariah Mandiri.

4.2 Pembahasan

Dalam sub bab pembahasan, peneliti mendeskripsikan hasil analisis data hasil wawancara maupun hasil analisis laporan CSR dalam bentuk naratif per permasalahan penelitian yang telah ditulis pada bab I.

4.2.1 Pelaksanaan program CSR pada Bank Syariah Mandiri.

Berikut merupakan tabel ringkas mengenai hasil analisis data penelitian mengenai pelaksanaan program CSR pada Bank Syariah Mandiri :

Topik Bahasan Penelitian	Teori	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Motivasi CSR	Menurut Susanta (2007) : 1. Menciptakan <i>brand image</i> dan <i>brand reputation</i> . <i>Image</i> atau reputasi dari sebuah merek, baik merek produk maupun perusahaan. 2. Mengatasi krisis manajemen. 3. Meningkatkan motivasi karyawan dan menarik karyawan berkualitas. 4. Menciptakan inovasi. Perusahaan tidak dapat bertahan tanpa adanya inovasi. Seringkali inovasi didapatkan dari hubungan yang dibangun oleh perusahaan dengan masyarakat sekitar melalui aktivitas CSR.	CSR pada BSM dilaksanakan dengan motivasi menjaga nama baik BSM dan untuk membantu sesama baik itu dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan. Beberapa tujuan BSM dalam melaksanakan program CSR yang mendukung pernyataan diatas dikutip dari <i>official web</i> BSM adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan nilai <i>brand</i> BSM dengan membangun reputasi yang baik; b. Meningkatkan kesadaran publik tentang BSM melalui kegiatan-kegiatan sosial. CSR bagi BSM diposisikan sebagai strategi inti (<i>core strategy</i>) dan menjadikannya sebagai sumber inovasi dan efisiensi untuk meningkatkan keunggulan bersaing (<i>competitive advantage</i>) perusahaan. (laporan tahunan manajemen BSM 2010)	Motivasi CSR BSM jika dikaitkan dengan teori Susanta (2007) adalah untuk menciptakan <i>brand image</i> dan <i>brand reputation</i> serta untuk menciptakan inovasi.
Pandangan perusahaan terhadap CSR	Wibisono (2007) 1. Sekedar basa-basi dan keterpaksaan, yaitu pelaksanaan CSR	BSM melakukan kegiatan CSR dengan harapan untuk mendapatkan citra yang baik kepada masyarakat	Pandangan BSM terhadap CSR jika

	<p>karena faktor eksternal (<i>external driven</i>). Diimplementasikan sebagai upaya dalam konteks <i>public relation</i> yang diliputi kemauan meraih kesempatan untuk melakukan publikasi positif dan untuk meningkatkan citra perusahaan yang didasarkan bukan atas regulasi CSR dari pemerintah;</p> <p>2. Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (<i>compliance</i>), didasarkan atas adanya regulasi, hukum, dan aturan yang memaksanya. Kewajiban perusahaan melaksanakan CSR adalah karena adanya <i>market driven</i> (dorongan pasar/masyarakat dan lingkungan setempat). Pandangan lain yang sanggup memaksa perusahaan untuk mempraktekkan CSR adalah adanya penghargaan-penghargaan (<i>reward</i>) yang diberikan oleh segenap institusi atau lembaga.</p> <p>3. <i>Beyond compliance</i> atau <i>compliance plus</i>, yakni CSR diimplementasikan karena memang ada dorongan yang tulus dari dalam (<i>internal driven</i>).</p>	<p>sehingga masyarakat memberikan kepercayaan pada BSM. Namun, BSM juga melakukan kegiatan CSR dengan dorongan dari dalam hati tulus ingin membantu seperti pernyataan dari koordinator LAZ BSM cabang utama Bandung: “Tapi setelah kesini itu ada kebijakan baru lagi bahwa Qardhul Hasan sistemnya dihapus, tidak ada Qardhul Hasan. Ya, Qardhul Hasan itu justru namanya itu..seakan-akan kayak dihibahkan tapi tetep kalau saya memberikan itu seakan-akan pinjam. Maksud dan tujuan saya supaya mengajari orang tersebut supaya bertanggungjawab. Nanti kalau dari awal saya berikan begitu aja. Wah, enak kita gak ada tanggungjawab ya ... trus, dan saya sarankan untuk membuka rekening di BSM. Maksud dan tujuan untuk supaya mudah untuk mengontrol bahwa tanggungjawab beliau itu seperti apa..bener ato tidak tiap bulannya misalnya saya tentukan seperti yang saya bilang tadi, tiap bulan 100rb, udah. Nanti pada saat jatuh tempo, itu uang kembali lagi ... Ya, tapi dengan syarat sudah satu tahun cicilan itu. Lho?bukan, kalau sudah jatuh tempo nanti silahkan aja ambil lagi”. Dikutip dari laporan manajemen BSM 2010 (laporan CSR), BSM menyatakan bahwa BSM tidak memandang manfaat</p>	<p>disesuaikan dengan teori wibisono (2007) maka BSM melakukan CSR berdasarkan Beyond compliance atau compliance plus</p>
--	---	---	---

		<p>ekonomi (economic performance) dari keberadaan perusahaan hanya sebatas pada kontribusi perusahaan untuk menghasilkan laba bersih ..., yang selanjutnya dibagikan kepada pemegang saham ... Akan tetapi, BSM juga memandang penting distribusi ekonomi kepada para pegawai perusahaan...Selain itu, kontribusi ekonomi perusahaan juga terlihat nyata dari berbagai pembayaran kepada para pemasok barang/jasa, sumbangan-sumbangan serta bantuan kemasyarakatan lainnya.</p>	
Metamorfosis CSR	<p>Za'im Zaidi (2003) dalam Ambadar (2008) dalam Adji (2010), paradigma metamorphosis CSR ada 3 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Charity (karitatif) : hanya sekedar sumbangan 2. Philantropy (filantropis) : membantu sesama karena dilandasi rasa persaudaraan 3. Good Corporate Citizenship (kewargaan) : membangun masyarakat secara berkelanjutan 	<p>BSM meyakini bahwa perusahaan bisa tumbuh dan berkembang dengan melalui cara lain tetap menjalankan praktek bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Disamping itu BSM melakukan pengelolaan CSR dengan terencana, terorganisasi dan terprogram dimana yang mengelola CSR sendiri berkerjasama dengan LAZNAS BSM dengan menggunakan dana pribadi dari pihak BSM dan karyawan. Penerima manfaat CSR tidak dibatasi oleh orang miskin saja, namun masyarakat luas seperti misalnya, perbaikan jalan, gedung sekolah, penanaman seribu pohon, budidaya jamur, dll. Pelaksanaan CSR juga terinspirasi dari kepentingan bersama.</p>	<p>Pelaksanaan CSR pada BSM jika disandingkan dengan teori dari Za'im Zaidi merupakan metamorphosis CSR pada paradigma filantropis</p>
Model pelaksanaan CSR	<p>Menurut Mulyadi (2007)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlibat langsung. Dalam melaksanakan 	<p>Dalam pelaksanaan CSR, BSM bekerjasama dengan Yayasan Bangun Sejahtera</p>	<p>Model Pelaksanaan</p>

	<p>program CSR, perusahaan melakukannya sendiri tanpa melalu perantara atau pihak lain.</p> <p>2. Melalui Yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau groupnya. Pada model ini biasanya perusahaan sudah menyediakan dana khusus untuk digunakan secara teratur dalam kegiatan yayasan.</p> <p>3. Bermitra dengan pihak lain. Dalam menjalankan CSR perusahaan menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti lembaga sosial non pemerintah, lembaga pemerintah, media massa dan organisasi lainnya.</p> <p>4. Mendukung atau bergabung dengan suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.</p>	<p>Mitra Umat yang telah menjadi Lembaga Amil Zakat yang biasa dikenal dengan LAZNAS BSM. Yayasan ini berdiri sendiri namun didalamnya terdapat beberapa anggota BSM yang menjadi dewan pertimbangan dan menjadi koordinator LAZ di tiap cabang BSM. Sehingga LAZNAS memiliki kantor perwakilan dengan kerjasama kantor cabang BSM.</p>	<p>CSR pada BSM jika disubstitusikan dengan teori Mulyadi (2007) maka BSM melakukan dengan mendukung atau bergabung dengan suatu konsorsium.</p>
Strategi pengembangan masyarakat	<p>Chin dan Benne (1961) dalam Nasdian (2006)</p> <p>1. <i>Rational-empirical</i> adalah strategi PM yang didasarkan atas pandangan yang optimistik karena strategi ini mempunyai asumsi dasar bahwa</p>	<p>BSM dalam pelaksanaan CSR kepada masyarakat lebih kepada bantuan dan penyuluhan atas bantuan tersebut. Jadi ketika ada suatu kelompok usaha masyarakat yang mendapatkan bantuan dari BSM, maka masyarakat</p>	<p>Strategi pengembangan masyarakat pada BSM adalah dengan <i>Normative-</i></p>

	<p>manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akalanya sehingga mereka akan bertindak secara rasional;</p> <p>2. <i>Normative-reeducative</i> adalah strategi PM yang menekankan pada bagaimana klien memahami permasalahan perubahan sikap, keterampilan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia, sehingga lebih menekankan pada proses pendidikan dibandingkan hasil perubahan itu sendiri;</p> <p>3. <i>Power-coersive</i> adalah strategi PM yang cenderung memaksakan kehendak dan pikiran sepihak tanpa menghiraukan kondisi dan keadaan serta situasi yang sebenarnya dimana program itu akan dilaksanakan, sedangkan objek utama dari program itu sendiri sama sekali tidak dilibatkan baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya</p>	<p>tersebut akan diberikan pelatihan mengenai usaha tersebut, bagaimana menjalankannya dengan baik dan sebagainya seperti pengakuan koordinator LAZ, “euu.. memang disitu kita diwajibkan untuk memberikan ini juga..istilahnya kalo dilapangan seharusnya ya..dikasih pendidikan juga..cara dagang..ato cara kayak berkebun.. kayak apa itu kn kayak pertanian”. Tidak hanya itu, bagi murid-murid yang mendapatkan beasiswa, maka BSM pun memberikan pengarahan kepada para orang tua mengenai fungsi dari dana yang diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan pengakuan coordinator LAZ, “itu sebelumnya sudah saya wanti-wanti bahwa ini kepedulian kami dari lembaga LAZ pusat bahwa membantu keberadaan bapak ibu untuk putranya gitu ..jadi orang tuanya diberi pengarahan juga..”</p>	<p><i>reeducative</i> jika disesuaikan dengan teori Chin dan Benne (1961)</p>
Partisipasi masyarakat	<p>Arnstein (1969) dalam Wazdy (2009) dalam Adji (2010)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Manipulation</i> bisa diartikan tidak ada komunikasi apalagi dialog; 2. <i>Therapy</i> berarti ada komunikasi namun masih bersifat terbatas, 	<p>Untuk menentukan program CSR dan dimana lokasinya, LAZ pusat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan proposal mengenai masalah yang dihadapi. Misalnya, proposal untuk</p>	

	<p>inisiatif dari pemerintah dan hanya satu arah;</p> <p>3. <i>Information</i> menyiratkan bahwa komunikasi sudah banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah;</p> <p>4. <i>Consultation</i> bermakna bahwa komunikasi telah berjalan dua arah;</p> <p>5. <i>Placatio</i> berarti bahwa komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat dapat memberi saran tetapi tidak memiliki kewenangan menentukan keputusan (partisipasi semu);</p> <p>6. <i>Partnership</i> berarti suatu kondisi pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar;</p> <p>7. <i>Delegated power</i> berarti bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa keperluan; dan</p> <p>8. <i>Citizen control</i> berarti bahwa masyarakat menguasai kebijakan publik mulai dari perumusan, implementasi hingga evaluasi dan kontrol</p>	<p>pembangunan sekolah yang sudah tidak layak pakai, perbaikan jalan atau jembatan umum yang sudah mau ambruk. Proposal tersebut akan dipelajari oleh pihak LAZ pusat dengan bantuan dari koordinator LAZ dicabang BSM yang terletak dekat dengan wilayah yang diajukan, untuk melakukan survei ke lapangan dan membuat analisa. Kemudian jika layak, maka LAZ pusat menyetujui proposal tersebut dan melakukan CSR dengan bantuan panitia kecil dari cabang BSM bersangkutan. Selaras dengan yang diungkapkan oleh koordinator LAZ cabang utama Bandung, “jadi prosedurnya seandainya nisa misalnya punya ada salah satu kampung yang disitu itu emang ekonominya tidak bagus tapi ada yang mengelola..ingin memajukan..ingin mengembangkan ekonomi umat yang disebelah..yang didaerah itu..ajukan aja proposal langsung ke LAZ pusat..nanti insyaAllah dari petugas LAZ nanti ada yang survei..memang betul,, insyaAllah nanti bisa bekerjasama dalam bentuk..ini kekurangannya apa ini..dibikinkan..gitu..bahkan sampai ngeliat kondisi didaerah tertentu ada jembatan yang udah mau ambruk sedangkan itu teh untuk jalan umum ato apa..insyaAllah disitu akan dibangun..trus sekolah-sekolah yang</p>	<p>Partisipasi Masyarakat pada program CSR BSM berada pada tingkat Placatio jika dilihat dari teori Arnstein (1969)</p>
--	---	---	---

		<p>roboh..kadang-kadang didaerah terpencil kn itu..ni y itu..ikut berpartisipasi disitu..”</p>	
<p>CSR berdasarkan prinsip syariah</p>	<p>Didalam hukum Islam, tidak dinyatakan bahwa bantuan/sedekah memiliki akad. Karena sedekah sendiri memiliki cakupan yang luas seperti hadist nabi Muhammad S.A.W: Dari abu Musa Al-Asyyary r.a dari Rasulullah S.A.W bersabda, “Tiap-tiap muslim haruslah bersedekah”; Sahabat bertanya, “bagaimana kalau dia tidak mampu Ya Rasulullah?”; Nabi menjawab, “dia harus berusaha dengan kedua tangan (tenaga)nya hingga berhasil untuk dirinya dan untuk bersedekah”; Sahabat bertanya, “Bagaimana kalau dia tidak mampu?”; Nabi menjawab, “Menolong orang yang mempunyai keluhan dan kebutuhan”; Sahabat bertanya, “bagaimana kalau dia tidak mampu?”; Nabi menjawab, “Dia melakukan suatu perbuatan baik atau menahan dirinya dari perbuatan mungkar (kejahatan) itupun merupakan shdaqah baginya”</p>	<p>Dana yang diambil dari gaji tiap karyawan BSM tiap bulannya memang terkumpul menjadi zakat yang diberikan pada rekening BSM. Namun pada pelaksanaannya, dana tersebut digunakan untuk membantu masyarakat dan lingkungan yang membutuhkan. Dipergunakan untuk program Pengembangan Ekonomi Umat, Program Pengembangan Pendidikan, Program Perbaikan Kesehatan, Program Sosial/Budaya, Program Pelestarian Lingkungan. Pelaksanaan bantuan ini yang merupakan ke dalam program CSR, dilakukan secara sukarela, jumlah yang dikeluarkan disesuaikan dengan kebutuhan dari program itu sendiri sehingga hal ini menjadi shadaqah. Shadaqah pula luas cakupannya, tidak hanya memberi bantuan dalam bentuk dana, tapi juga memberikan pelatihan kepada masyarakat dan karyawan. Mengenai penggunaan akad pada kegiatan CSR ini, koordinator LAZ berkomentar, “Kalau untuk itu sih, untuk pemberian itu sih selama ini sih saya tidak menggunakan seperti itu sih. Secara syariah yang namanya pemberian hibah kalau kayak apa..saya rasa kok saya belum tau juga ya. Misalnya memberikan</p>	<p>Pelaksanaan CSR pada BSM dapat dikatakan masih dalam koridor hukum Islam</p>

		sesuatu ada akadnya, yang jelas kalau dalam Islam kan memberikan sesuatu ada ijab kabulnya aja. Tidak ada yang tertulis kalau misalnya ini, cuma biasanya suka ada tanda terima lah kayak kita misalnya memberikan sumbangan kepada yatim piatu itu kan salah satu bentuk daripada administrasi kita bagus. Kan supaya nanti juga, itu kan LAZ juga diaudit..betul gak ininya, sesuai atau tidak. Ada diaudit juga”	
Konsep pembangunan berkelanjutan	Menurut Jaya (2004), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan strategi pelaksanaannya, diantaranya ada empat hal yang perlu diperhatikan yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang yang diikuti pendekatan secara ideal. Pembangunan berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan yaitu keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.	Jika dipelajari lagi hasil wawancara yang dilakukan bersama koordinator LAZ tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan CSR pada BSM tidak berada pada satu tempat namun berpindah-pindah. Hanya saat itu, dan ketika program CSR selesai dilaksanakan, maka BSM berpindah pada daerah baru. Maksudnya agar merata keseluruh daerah. Tidak hanya terfokus pada area tertentu. Seperti yang diungkapkan beliau dalam wawancara, “Ohh, berkelanjutan, insyaAllah berkelanjutan. Misalnya di daerah sini. Ohh, kemaren maksud dan tujuan itu, kaya semacam apa ya. Sedikit-sedikit tapi supaya merata itu nisa. Misalnya ohh daerah CSR dibulan ini udah saya lakukan. Ohh disini lah muter ke kampung lainnya lagi. Misalnya bikin mck atau untuk itu. Seperti itu, jadi gak dikampung itu aja trus. Gak. Kan pemerataan”	Konsep pembangunan melalui program CSR pada BSM dapat dikatakan berkelanjutan.

Tabel 4.2.1 (1)
Ringkasan Analisis Data Penelitian Program Pelaksanaan CSR pada BSM

4.2.1.1 Motivasi Corporate Social Responsibility (CSR)

Bank Syariah Mandiri (BSM) mulai menerapkan program sekitar tahun 2001 dengan motivasi menjaga nama baik BSM dan untuk membantu sesama baik itu dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan. Beberapa tujuan BSM dalam melaksanakan program CSR yang mendukung pernyataan mengenai motivasi tersebut dikutip dari *official web* BSM adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan nilai *brand* BSM dengan membangun reputasi yang baik;
- b. Meningkatkan kesadaran publik tentang BSM melalui kegiatan-kegiatan sosial.

CSR bagi BSM diposisikan sebagai strategi inti (*core strategy*) dan menjadikannya sebagai sumber inovasi dan efisiensi untuk meningkatkan keunggulan bersaing (*competitive advantage*) perusahaan seperti yang tertulis pada Laporan CSR yang tergabung dalam Laporan Tahunan Manajemen BSM 2010.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Susanta (2007) bahwa terdapat 4 macam motivasi yang mendorong perusahaan untuk melakukan CSR, yaitu :

1. Menciptakan *brand image* dan *brand reputation*. *Image* atau reputasi dari sebuah merek, baik merek produk maupun perusahaan.
2. Mengatasi krisis manajemen.
3. Meningkatkan motivasi karyawan dan menarik karyawan berkualitas.
4. Menciptakan inovasi. Seringkali inovasi didapatkan dari hubungan yang dibangun oleh perusahaan dengan masyarakat sekitar melalui aktivitas CSR.

Menurut peneliti, motivasi adalah niat atau alasan yang dapat menggerakkan perusahaan untuk melakukan sesuatu. Sehubungan dengan hal tersebut, motivasi CSR sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan CSR nya sendiri karena itu lah yang menjadi tujuan akhir selama melaksanakan CSR. Oleh sebab itu, perusahaan sedemikian mungkin melaksanakan program mereka agar mendapatkan feedback dari para stakeholder sesuai dengan harapan.

Setelah mengetahui kenyataan CSR dari hasil wawancara, didukung dengan pernyataan bahwa motivasi CSR BSM adalah untuk menjaga nama baik BSM dan membantu sesama, dan menjadikan CSR sebagai inovasi. Maka motivasi CSR BSM jika disesuaikan dengan teori diatas adalah untuk menciptakan *brand image* dan *brand reputation* serta menciptakan inovasi.

4.2.1.2 Pandangan perusahaan terhadap CSR

Menurut Wibisono (2007), pandangan perusahaan terhadap CSR dapat dikategorikan menjadi tiga model cara pandang :

1. Sekedar basa-basi dan keterpaksaan, yaitu pelaksanaan CSR karena faktor eksternal (*external driven*);
2. Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (*compliance*), didasarkan atas adanya regulasi, hukum, dan aturan yang memaksanya.
3. *Beyond compliance* atau *compliance plus*, yakni CSR diimplementasikan karena memang ada dorongan yang tulus dari dalam (*internal driven*).

Cara pandang perusahaan terhadap CSR merupakan pemahaman perusahaan dalam menerapkan program CSR. Apabila perusahaan melihat CSR sebagai program basa-basi, maka yang akan dihasilkan dari pelaksanaan CSR pun seadanya. Hanya untuk eksistensi. Program CSR dilaksanakan tersebar diberbagai daerah tapi tidak fokus karena CSR dipandang sebagai program pencitraan. Sedangkan jika perusahaan merasa bahwa melaksanakan CSR merupakan pemenuhan kewajiban, maka perusahaan akan lebih fokus terhadap ketentuan pemerintah yang memaksa. Program dan Laporan CSR yang dibuat terasa kaku karena hanya sekedar mematuhi peraturan. Namun, apabila perusahaan memandang pelaksanaan program CSR merupakan suatu bentuk tanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial yang benar-benar disadari dan didasari ketulusan hati, maka program CSR tersebut akan terasa bermanfaat dan benar-benar efektif karena tepat sasaran.

Tidak muluk-muluk, BSM mengakui melakukan kegiatan CSR dengan harapan untuk mendapatkan citra yang baik dimata masyarakat sehingga masyarakat memberikan kepercayaannya pada BSM. Namun, BSM juga melakukan kegiatan CSR dengan dorongan dari dalam hati tulus ingin membantu seperti pernyataan dari koordinator LAZ BSM cabang utama Bandung:

“Tapi setelah kesini itu ada kebijakan baru lagi bahwa Qardhul Hasan sistemnya dihapus, tidak ada Qardhul Hasan. Ya, Qardhul Hasan itu justru namanya itu, seakan-akan kayak dihibahkan tapi tetep kalau saya memberikan itu seakan-akan pinjam. Maksud dan tujuan saya supaya mengajari orang tersebut supaya bertanggungjawab. Nanti kalau dari awal saya berikan begitu aja. Wah, enak kita gak ada tanggungjawab ya. Jadi nanti, euuu..misalnya persetujuan tapi tetep koordinator LAZ di cabang mengusulkan ke kantor pusat nanti kantor pusat udah di acc, kita bikin kan semacam kayak surat SPDK, surat persetujuan pemberian pembiayaan, gitu untuk jangka waktu sekian. Trus, dan saya sarankan

untuk membuka rekening di BSM. Maksud dan tujuan untuk supaya mudah untuk mengontrol bahwa tanggungjawab beliau itu seperti apa, benar ato tidak tiap bulannya misalnya saya tentukan seperti yang saya bilang tadi, tiap bulan 100ribu. Udah. Nanti pada saat jatuh tempo, itu uang kembali lagi (...) Ya, tapi dengan syarat sudah satu tahun cicilan itu. Lho?bukan, kalau sudah jatuh tempo nanti silahkan aja ambil lagi (...). Disamping itu kan juga dari segi ini, pertama, suatu pembelajaran dia supaya nabung. Keduanya, istilahnya kan semacam BSM kan nambah nasabah dan namanya mustahiq kecil itu untuk menghindari biaya administrasi..euu..buku tabungan tu kan 6 ribu. Saya bukakan aja tabunganku yang atau buku simpatik itu. Kan biaya bulanannya kecil”.

Disamping itu, secara *off record* koordinator *sharing* pengalaman ketika beliau membantu pedagang disuatu tempat makan dipinggir jalan, keluar dari jeratan rentenir akibat meminjam dana untuk modal usaha. Beliau menganjurkan pedagang tersebut untuk mengajukan pembiayaan dari program Mitra Umat. Walaupun sebenarnya tanpa sepengetahuan si pedagang, duit tersebut telah menjadi haknya.

Dikutip dari laporan manajemen BSM 2010(laporan CSR), BSM menyatakan bahwa BSM tidak memandang manfaat ekonomi (*economic performance*) dari keberadaan perusahaan hanya sebatas pada kontribusi perusahaan untuk menghasilkan laba bersih (...), yang selanjutnya dibagikan kepada pemegang saham (...). Akan tetapi, BSM juga memandang penting distribusi ekonomi kepada para pegawai perusahaan (...). Selain itu, kontribusi ekonomi perusahaan juga terlihat nyata dari berbagai pembayaran kepada para pemasok barang/jasa, sumbangan-sumbangan serta bantuan kemasyarakatan lainnya.

Maka dapat disimpulkan, pandangan BSM terhadap CSR jika disesuaikan dengan teori wibisono (2007) adalah berdasarkan *beyond compliance* atau

compliance plus. Karena CSR tidak dipandang sebagai paksaan tapi lahir dari ketulusan untuk membantu lingkungan dan sosial disekitarnya.

4.2.1.3 Metamorfosis CSR

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan industri bisnis, CSR dalam pelaksanaannya mengalami metamorphosis. Za'im Zaidi menggambarkan metamorphosis CSR kedalam tiga perubahan dalam tabel berikut :

Paradigma	<i>Charity</i>	<i>Philantropy</i>	<i>Good Corporate Citizenship (GCC)</i>
Motivasi	Agama, tradisi, adaptasi	Norma, etika dan hukum universal	Pencerahan diri dan rekonsiliasi dengan ketertiban sosial
Misi	Mengatasi masalah setempat	Mencari dan mengatasi akar masalah	Memberikan kontribusi terhadap masyarakat
Pengelolaan	Jangka pendek, mengatasi masalah sesaat	Terencana, terorganisasi, dan terprogram	Terinternalisasi dalam kebijakan perusahaan
Pengorganisasian	Kepanitiaan	Yayasan/dana pribadi/profesionalitas	Keterlibatan baik dana maupun sumberdaya lain
Penerima Manfaat	Orang miskin	Masyarakat luas	Masyarakat luas dan perusahaan
Kontribusi	Hibah sosial	Hibah pembangunan	Hibah (sosial dan pembangunan serta keterlibatan sosial)
Inspirasi	Kewajiban	Kepentingan bersama	Kepentingan bersama

Tabel 4.2.1.3
Metamorfosis CSR

Peneliti berkesimpulan bahwa CSR dalam pelaksanaannya mengalami metamorphosis dari yang hanya bersifat *charity* (sumbangan) berubah menjadi

philanthropy (filantropis) yaitu bantuan yang didasari rasa kepedulian terhadap lingkungan dan sosial lalu menjadi kegiatan yang bersifat Good Corporate Citizenship (GCC) yang dalam pelaksanaannya lebih terfokus kepada pembangunan kemandirian masyarakat yakni program pemberdayaan.

BSM meyakini bahwa perusahaan bisa tumbuh dan berkembang dengan cara tetap menjalankan praktek bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Disamping itu BSM melakukan pengelolaan CSR dengan terencana, terorganisasi dan terprogram dimana BSM berkerjasama dengan LAZNAS BSM dengan menggunakan dana pribadi dari pihak BSM dan karyawan. Penerima manfaat CSR tidak dibatasi oleh orang miskin saja, namun masyarakat luas seperti misalnya, perbaikan jalan, gedung sekolah, peternakan kelinci, budidaya jamur, dll. Pelaksanaan CSR juga terinspirasi dari kepentingan bersama.

Dapat dikatakan pelaksanaan CSR pada BSM jika disandingkan dengan teori dari Za'im Zaidi merupakan metamorphosis CSR pada paradigma filantropis karena dilandasi rasa kepedulian, terorganisasi, dana dari BSM sendiri dan karyawan, dan yang mendapatkan manfaat tidak hanya orang miskin, namun juga masyarakat luas.

4.2.1.4 Model Pelaksanaan CSR

Dalam pelaksanaan CSR, BSM bekerjasama dengan Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat yang telah menjadi Lembaga Amil Zakat yang biasa dikenal dengan LAZNAS BSM. Yayasan ini berdiri sendiri dengan visi, misi, dan nilai-nilai sebagai berikut :

1. Visi LAZNAS BSM:
Menjadi lembaga pemberdayaan umat yang terpercaya.
2. Misi LAZNAS BSM:
 - a) Berperan aktif dalam penghimpunan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf Umat serta menyalurkannya untuk kesejahteraan Umat.
 - b) Senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik sebagai identitas LAZ yang profesional.
 - c) Melaksanakan kegiatan dengan keterbukaan dan berpegang teguh pada ketentuan Syariah Islam.
3. Nilai-nilai LAZNAS BSM:
LAZNAS BSM berupaya mewujudkan nilai-nilai dalam pengelolaan Lembaga Amil Zakat, sebagai berikut:
 - a) Usaha yang tidak kenal lelah untuk meraih yang terbaik dan berguna.
 - b) Memberikan pelayanan yang terbaik, terbuka, cepat dan berdaya guna.
 - c) Aktif mengembangkan diri sebagai organisasi pembelajar.
 - d) Teguh berpegang pada Syariah Islam sebagai landasan aktifitasnya.

Namun didalam LAZNAS BSM sendiri terdapat beberapa anggota BSM yang menjadi dewan pertimbangan dan menjadi koordinator LAZ ditiap cabang BSM. Sehingga LAZNAS memiliki kantor perwakilan dengan kerjasama kantor cabang BSM. Banyak persepsi keliru tentang posisi LAZNAS dalam BSM. Masyarakat mengira bahwa LAZNAS BSM merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri, namun pada kenyataannya BSM yang tercantum dibelakang nama LAZNAS merupakan nama yayasan dari LAZNAS sendiri yaitu Bangun Sejahtera Mitra Umat.

Menurut Mulyadi (2007), model pelaksanaan CSR pada BSM terbagi menjadi 4 model pelaksanaan :

1. Terlibat langsung.
2. Melalui Yayasan atau organisasi sosial perusahaan.
3. Bermitra dengan pihak lain.

4. Mendukung atau bergabung dengan suatu konsorsium.

Peneliti berpendapat model pelaksanaan CSR adalah bagaimana perusahaan melakukan kegiatan CSR nya. Perusahaan dapat langsung berkecimpung dilapangan atas nama perusahaan, dimana perusahaan membuat sebuah divisi yang khusus mengelola kegiatan CSR. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan CSR melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan yang berdiri dibawah naungan perusahaan, seperti Danamon Peduli, Sampoerna Foundation, dan lain-lain. Atau juga, perusahaan dapat bermitra dengan pihak lain atau organisasi sosila diluar perusahaan, contohnya bekerjasama dengan dompet dhuafa, rumah zakat, dan lain-lain. Jika tidak dengan tiga model seblumnya, perusahaan pun dapat mengelola kegiatan CSR bersama dengan yayasan atau organisasi sosial yang berdiri sendiri namun dengan dukungan langsung dari perusahaan baik sebagai sumber dana pokok maupun mengerahkan anggota perusahaan untuk ikut tergabung dalam yayasan tersebut.

Melihat hasil analisis mengenai pengelolaan CSR BSM yang bekerjasama dengan LAZNAS BSM dimana LAZNAS memiliki koordinator LAZ disetiap cabang BSM yang berfungsi sebagai penghubung langsung dengan LAZ pusat dan yang melakukan CSR dilapangan, maka model pelaksanaan CSR pada BSM jika disubstitusikan dengan teori Mulyadi (2007) adalah dengan mendukung atau bergabung dengan suatu konsorsium.

4.2.1.5 Strategi Pengembangan Masyarakat

BSM dalam pelaksanaan CSR kepada masyarakat lebih kepada bantuan dan penyuluhan berkaitan dengan jenis bantuan tersebut. Jadi, ketika ada suatu kelompok usaha masyarakat yang mendapatkan bantuan dari BSM, maka masyarakat tersebut akan diberikan pelatihan mengenai usaha tersebut, bagaimana menjalankannya dengan baik dan sebagainya seperti pengakuan koordinator LAZ berikut,

“euu.. memang disitu kita diwajibkan untuk memberikan ini juga..istilahnya kalo dilapangan seharusnya ya dikasih pendidikan juga. Cara dagang atau cara kayak berkebun”.

Tidak hanya itu, bagi murid-murid yang mendapatkan beasiswa maka BSM pun memberikan pengarahan kepada para orang tua mengenai fungsi dari dana yang diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan pengakuan koordinator LAZ,

“Itu sebelumnya sudah saya wanti-wanti bahwa ini kepedulian kami dari lembaga LAZ pusat bahwa membantu keberadaan bapak ibu untuk putranya, gitu. Jadi orang tuanya diberi pengarahan juga”

Chin dan Benne (1961) dalam Nasdian (2006) memperkenalkan tiga jenis strategi pengembangan masyarakat, yakni :

1. *Rational-empirical* adalah strategi PM yang didasarkan atas pandangan yang optimistik karena strategi ini mempunyai asumsi dasar bahwa manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akalinya sehingga mereka akan bertindak secara rasional;

2. *Normative-reeducative* adalah strategi PM yang menekankan pada bagaimana klien memahami permasalahan pembaruan seperti perubahan sikap, keterampilan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia, sehingga lebih menekankan pada proses pendidikan dibandingkan hasil perubahan itu sendiri; dan
3. *Power-coersive* adalah strategi PM yang cenderung memaksakan kehendak dan pikiran sepihak tanpa menghiraukan kondisi dan keadaan serta situasi yang sebenarnya dimana program itu akan dilaksanakan, sedangkan objek utama dari program itu sendiri sama sekali tidak dilibatkan baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya

Peneliti beranggapan bahwa strategi pengembangan masyarakat adalah cara perusahaan mengembangkan masyarakat disekitarnya dengan menggunakan pola pikir bahwa masyarakat dapat bertindak rasional sehingga strategi pengembangan juga turut dipercayakan kepada masyarakat (*rational-empirical*), atau dengan lebih menekankan kepada proses pendidikan masyarakat tersebut namun tidak terlalu memikirkan hasil dari proses itu sendiri (*normative-reeducative*). Selain dua strategi sebelumnya, perusahaan mengembangkan masyarakat dengan cenderung memaksakan kehendak dan pikiran dimana masyarakat hanya bisa menerima tanpa dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya.

Jika diperhatikan dari hasil wawancara terkait, maka strategi pengembangan masyarakat pada BSM adalah dengan *Normative-reeducative* apabila disesuaikan dengan teori Chin dan Benne (1961) karena BSM melaksanakan CSR tidak secara sepihak tapi melalui saran, survei langsung dan analisa. Selain itu, BSM juga memberikan pendidikan terhadap masyarakat yang mendapatkan bantuan.

4.2.1.6 Partisipasi Masyarakat

Peneliti berpendapat bahwa untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan CSR dirasa sangat diperlukan karena program CSR bertujuan untuk membangun masyarakat, menjadikannya mandiri dan juga memperbaiki lingkungan secara berkelanjutan. Selaku penerima manfaat, maka partisipasi masyarakat benar-benar berpengaruh terhadap keberhasilan program ini. Berikut tingkatan partisipasi masyarakat menurut Arnstein (1969) dalam Wazdy (2009) dalam Adji (2010) :

8	<i>Citizen control</i>	<i>Degree of citizen power</i>
7	<i>Delegated power</i>	
6	<i>Partnership</i>	
5	<i>Placation</i>	<i>Degree of tokenism</i>
4	<i>Consultation</i>	
3	<i>Information</i>	<i>Non participation</i>
2	<i>Therapy</i>	
1	<i>Manipulation</i>	

Tabel 4.2.1.6
Tingkat Partisipasi Masyarakat

Untuk menentukan program CSR dan dimana lokasinya, LAZ pusat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan proposal mengenai masalah yang dihadapi. Misalnya, proposal untuk pembangunan sekolah yang sudah tidak layak pakai, perbaikan jalan atau jembatan umum yang sudah mau ambruk. Proposal tersebut akan dipelajari oleh pihak LAZ pusat dengan bantuan dari koordinator LAZ dicabang BSM yang terletak dekat dengan wilayah yang diajukan, untuk melakukan survei ke lapangan dan membuat analisa. Kemudian jika layak, maka LAZ pusat menyetujui proposal tersebut dan melakukan CSR dengan bantuan panitia kecil dari

cabang BSM bersangkutan. Selaras dengan yang diungkapkan oleh koordinator LAZ cabang utama Bandung,

“Jadi prosedurnya seandainya nisa misalnya punya ada salah satu kampung yang disitu itu emang ekonominya tidak bagus tapi ada yang mengelola, ingin memajukan, ingin mengembangkan ekonomi umat yang disebelah..yang didaerah itu, ajukan aja proposal langsung ke LAZ pusat. Nanti insyaAllah dari petugas LAZ nanti ada yang survei. Memang betul, insyaAllah nanti bisa bekerjasama dalam bentuk..ini kekurangannya apa ini..dibikinkan, gitu. Bahkan sampai ngeliat kondisi didaerah tertentu ada jembatan yang udah mau ambruk sedangkan itu teh untuk jalan umum atau apa, insyaAllah disitu akan dibangun. Trus sekolah-sekolah yang roboh, kadang-kadang didaerah terpencil kan itu..ni ya itu..ikut berpartisipasi disitu”

Untuk lebih jelasnya, prosedur pengajuan sampai dengan pelaksanaan program CSR adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat mengajukan proposal langsung dikirimkan kepada LAZNAS pusat atau diserahkan kepada koordinator LAZ cabang terdekat.
2. Jika diserahkan kepada koordinator LAZ, maka proposal tersebut akan dikirimkan ke kantor LAZ pusat. Setelah itu, LAZ pusat akan mempelajari isi proposal tersebut.
3. LAZ pusat memberi komando kepada koordinator LAZ cabang diwilayah tempat program CSR akan dilaksanakan, untuk melakukan survey ke lapangan.
4. Setelah melakukan survey, koordinator LAZ membuat analisa, layak atau tidaknya melakukan CSR disana. Kemudian hasil analisa tersebut diserahkan kepada LAZ pusat.
5. Jika dianggap layak, LAZ menyetujui pelaksanaan CSR tersebut.

6. Koordinator LAZ membentuk panitia kecil (tidak terikat), lalu melakukan perencanaan dan melaksanakan program.
7. Setelah pelaksanaan selesai, dibuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan diserahkan pada LAZ pusat. Kemudian panitia dibubarkan.

Dalam proses pemilihan program dan lokasi CSR, masyarakat sangat diperlukan kerjasamanya bagi pihak LAZ pusat agar dapat menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat pada program CSR BSM berada pada tingkat *Placatio* dimana komunikasi berjalan baik dan masyarakat dapat memberi saran tetapi tidak memiliki kewenangan dalam penentuan keputusan jika dilihat dari teori Arnstein (1969).

4.2.1.7 CSR Berdasarkan Prinsip Syariah

Untuk dana kegiatan CSR, salah satu sumbernya didebet dari gaji tiap karyawan BSM tiap bulannya sebesar yang telah disepakati sebelumnya, yaitu 2,5%. Memang dana tersebut terkumpul menjadi zakat yang dimasukkan ke rekening LAZNAS. Namun pada pelaksanaannya, dana tersebut digunakan untuk membantu masyarakat dan lingkungan yang membutuhkan. Dipergunakan untuk program Pengembangan Ekonomi Umat, Program Pengembangan Pendidikan, Program Perbaikan Kesehatan, Program Sosial/Budaya, Program Pelestarian Lingkungan sehingga dapat disebut juga dengan *shadaqah*.

Pelaksanaan bantuan ini yang mencakup tiga aspek program CSR, yakni sosial, ekonomi dan lingkungan, dilakukan secara sukarela. Jumlah yang dikeluarkan

disesuaikan dengan kebutuhan dari program itu sendiri. Shadaqah pula luas cakupannya, tidak hanya memberi bantuan dalam bentuk dana, tapi juga memberikan pelatihan kepada masyarakat dan karyawan. Mengenai penggunaan akad pada kegiatan CSR ini, koordinator LAZ berkomentar,

“Kalau untuk itu sih, untuk pemberian itu sih selama ini sih saya tidak menggunakan seperti itu sih. Secara syariah yang namanya pemberian hibah kalau kayak apa..saya rasa kok saya belum tau juga ya. Misalnya memberikan sesuatu ada akadnya, yang jelas kalau dalam Islam kan memberikan sesuatu ada ijab kabulnya aja. Tidak ada yang tertulis kalau misalnya ini, cuma biasanya suka ada tanda terima lah kayak kita misalnya memberikan sumbangan kepada yatim piatu itu kan salah satu bentuk daripada administrasi kita bagus. Kan supaya nanti juga, itu kan LAZ juga diaudit..betul gak ininya, sesuai atau tidak. Ada diaudit juga”

Didalam hukum Islam, tidak dinyatakan bahwa bantuan/sedekah memiliki akad. Karena sedekah sendiri memiliki cakupan yang luas seperti hadist nabi Muhammad S.A.W:

Dari abu Musa Al-Asyary r.a dari Rasulullah S.A.W bersabda, “Tiap-tiap muslim haruslah bersedekah”; Sahabat bertanya, “bagaimana kalau dia tidak mampu Ya Rasulullah?”; Nabi menjawab, “dia harus berusaha dengan kedua tangan (tenaga)nya hingga berhasil untuk dirinya dan untuk bersedekah”; Sahabat bertanya, “Bagaimana kalau dia tidak mampu?”; Nabi menjawab, “Menolong orang yang mempunyai keluhan dan kebutuhan”; Sahabat bertanya, “bagaimana kalau dia tidak mampu?”; Nabi menjawab, “Dia melakukan suatu perbuatan baik atau menahan dirinya dari perbuatan mungkar (kejahatan) itupun merupakan shdaqah baginya”

Selain itu, menurut keterangan praktisi ekonomi Islam CSR sebagai berikut :

“Dalam Islam itu tidak ada dasar tentang CSR, yang ada hanya sedekah, karena menurut Islam CSR itu termasuk sedekah. Permasalahannya kan dalam Islam, sedangkan ini bukan Negara Islam, karena buka Negara Islam maka disebutlah CSR, kalau dalam Islam kan bisa wakaf, sedekah, bisa macam-macam infaq.”

Merujuk pada ketentuan Islam dan hadist Nabi Muhammad SAW dan keterangan praktisi ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan CSR

pada BSM dapat dikatakan masih dalam koridor hukum Islam karena serah terima bantuan tidak perlu melakukan akad dimana hal ini bukan merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih.

4.2.1.8 Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Jika dipelajari lagi hasil wawancara yang dilakukan bersama koordinator LAZ tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan CSR pada BSM tidak berada pada satu tempat namun berpindah-pindah. Hal ini dimaksudkan agar merata keseluruh daerah. Namun, program CSR yang telah dilaksanakan tetap berkelanjutan hingga tahun-tahun mendatang. Seperti yang diungkapkan koordinator LAZ dalam wawancara,

“Ohh, berkelanjutan, insyaAllah berkelanjutan. Misalnya di daerah sini. Ohh, kemaren maksud dan tujuan itu, kaya semacam apa ya. Sedikit-sedikit tapi supaya merata itu nisa. Misalnya ohh daerah CSR dibulan ini udah saya lakukan. Ohh disini lah muter ke kampung lainnya lagi. Misalnya bikin mck. Seperti itu, jadi gak dikampung itu aja trus. Gak. Kan pemerataan”

Menurut Jaya (2004), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan strategi pelaksanaannya, diantaranya ada empat hal yang perlu diperhatikan yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang yang diikuti pendekatan secara ideal. Pembangunan berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan yaitu keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.

Peneliti menyimpulkan, bahwa program pembangunan yang berkelanjutan itu merupakan program yang dilakukan secara terus menerus secara merata sehingga program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Jika program CSR sudah dilaksanakan sesuai rencana pada area tertentu, barulah kemudian perusahaan mencari area baru yang membutuhkan dan melakukan program CSR disana.

Berdasarkan teori yang diungkapkan Jaya tersebut, dapat dilihat bahwa konsep pembangunan melalui program CSR pada BSM dapat dikatakan berkelanjutan. Karena program tersebut merupakan pemerataan program CSR di berbagai tempat, adanya partisipasi dalam masyarakat, keanekaragaman program CSR dan masyarakat yang menerima program tersebut.

4.2.2 Pelaporan program CSR pada Bank Syariah Mandiri.

Seperti yang telah diuraikan pada sub bab deskripsi masalah penelitian, peneliti mengetahui bahwa pada tiap cabang BSM di seluruh Indonesia tidak ikut dalam penyusunan laporan kegiatan CSR untuk cabangnya masing-masing. Mereka hanya ikut berpartisipasi dilapangan ketika kegiatan berlangsung. Selain itu, mereka juga membuat liputan tentang jalannya kegiatan dan membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan untuk diserahkan pada kantor pusat. Sementara itu, kantor pusat mereview laporan yang diterima. Setelah itu, memasukkannya ke dalam susunan laporan program CSR yang masih tergabung dalam Laporan Tahunan Manajemen BSM.

Menurut Andreas Lako, laporan CSR dapat disatukan dengan laporan tahunan. Namun jika dirasa kurang cukup, laporan CSR dapat dibuat terpisah. Laporan CSR pada BSM masih tergabung dalam Laporan Tahunan Manajemen BSM. Hal ini sesuai dengan pasal 66 yang memuat tentang laporan CSR untuk perseroan terbatas dimana disana terdapat keterangan bahwa laporan tahunan berisi laporan keuangan dan laporan CSR.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah bagian penting dari tujuan laporan keuangan. Trueblood Committee Report menyatakan:

An objective of financial statements is to report on those activities of the enterprise affecting society which can be determined and described or measured and which are important to the role of the enterprise in its social environment.

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa Laporan Keuangan yang objektif adalah untuk melaporkan aktivitas perusahaan yang mempengaruhi masyarakat yang mana dapat ditetapkan dan digambarkan atau diukur dan penting bagi peran perusahaan bagi lingkungan sosialnya.

Laporan kegiatan CSR menurut Gray et al (1994) merupakan suatu pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan kata lain, laporan CSR itu merupakan salah satu cara bagi para *stakeholder* maupun *shareholder* untuk mengawasi praktik perusahaan. Melalui laporan CSR juga perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat sekitar. Membuktikan bahwa perusahaan berkegiatan secara etis, peduli terhadap sesama.

Pelaporan CSR sangat penting baik bagi perusahaan maupun bagi *stakeholder* dan *shareholder* karena terdapat transparansi dalam kegiatan CSR, bukti bahwa perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Hal ini didukung pula dengan pernyataan praktisi ekonomi Islam mengenai pentingnya pelaporan CSR dalam hukum Islam sebagai berikut :

“Ya harus karena dengan adanya laporan kita bisa mengevaluasi, dalam Quran Surat Al Hasyr ayat 18 juga disebutkan “Hendaklah kita memperhatikan yang lalu untuk besok ” jadi yang lalu itu sama dengan kemarin, kita harus mencatatnya untuk esok hari, jadi kita harus punya *record*, dalam surat itu juga terdapat kata “Apabila kamu bermuamalah hendaklah dicatat” itu perintahnya, jadi selain untuk evaluasi bagi diri kita juga bisa meningkatkan kepercayaan untuk orang lain juga.”

Menurut Glautier dan Underdown (1986: 484 - 485) ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk pedoman pengukuran dalam pelaporan pertanggungjawaban sosial, yaitu :

1. Pendekatan Deskriptif (*the descriptive approach*)

Pendekatan deskriptif dipandang sebagai pendekatan yang umum digunakan. Dalam laporan sosial deskriptif, informasi mengenai semua aktivitas sosial perusahaan dilaporkan dalam bentuk uraian (deskriptif). Jadi pada pendekatan ini, aktifitas-aktifitas sosial perusahaan dalam pelaporannya tidak dikuantifikasikan dalam satuan uang.

2. Pendekatan biaya yang dikeluarkan (*the cost of outlay approach*)

Pendekatan biaya yang dikeluarkan menggambarkan semua aktivitas-aktivitas sosial perusahaan dikuantifikasikan dalam satuan uang dan menjadi hal yang

sebaliknya dari pendekatan deskriptif. Sehingga laporan yang dihasilkan oleh pendekatan biaya yang dikeluarkan mempunyai kemampuan untuk diperbandingkan antara laporan suatu tahun tertentu, dengan laporan tahun yang lain. Sedangkan kelemahannya adalah tidak disajikannya manfaat yang diperoleh sehubungan dengan telah dikeluarkannya biaya untuk suatu kegiatan.

3. Pendekatan biaya manfaat (*the cost benefit approach*)

Pendekatan biaya manfaat mengungkapkan baik biaya maupun manfaat dari aktivitas-aktivitas sosial perusahaan. Pendekatan biaya manfaat mungkin merupakan pendekatan yang paling ideal. Namun, dalam kenyatannya sulit untuk menerapkannya, antara lain karena tidak adanya alat ukur manfaat dari yang dihasilkan atas biaya yang telah dikeluarkan untuk aktivitas-aktivitas sosial perusahaan.

Setelah melakukan telaah laporan manajemen BSM dari awal pelaksanaannya sampai tahun 2010, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaporan CSR yang dibuat oleh BSM menggunakan pendekatan deskriptif karena informasi yang berkaitan dengan kegiatan CSR dipaparkan dalam bentuk uraian (deskriptif). Walaupun terdapat beberapa tabel mengenai laporan jumlah perolehan dana dan pengeluaran dana untuk kegiatan CSR.

Selain itu, ditemukan bahwa format laporan CSR yang bersatu dengan laporan manajemen tiap tahunnya tidak menggunakan format yang sama. Namun, dari tahun ke tahun terdapat peningkatan mutu laporan. Dengan memperinci informasi mengenai

kegiatan CSR, sumber dana, tujuan kegiatan, jumlah dana, foto kegiatan, sasaran, dan lain-lain.

Laporan CSR memiliki 6 prinsip sesuai dengan yang tertulis pada buku panduan *Sustainability Report* yang dibuat *Global Reporting Initiative (GRI)* dimana prinsip-prinsip ini yang mengarahkan pilihan dalam menjamin kualitas dari informasi yang dilaporkan termasuk penyajiannya yang memadai. Kebijakan terkait proses penyajian informasi dalam pembuatan laporan harus konsisten dengan Prinsip ini. Semua prinsip ini sangat fundamental bagi terwujudnya transparansi yang efektif. Kualitas informasi akan memungkinkan pemangku kepentingan untuk membuat penilaian yang masuk akal serta tindakan yang memadai terkait kinerja organisasi.

Berikut merupakan tabel analisis laporan CSR jika disesuaikan dengan prinsip-prinsip laporan CSR yang ditetapkan GRI.

Prinsip Laporan CSR	Penjelasan	Analisis	Kesimpulan
Keseimbangan : Laporan harus menggambarkan aspek positif dan negatif dari kinerja perusahaan untuk dapat memungkinkan penilaian yang masuk akal terhadap keseluruhan kinerja.	Keseluruhan penyajian isi laporan harus menyajikan gambaran yang tidak bias terhadap kinerja organisasi. Laporan harus menghindari pemilihan, penghilangan, atau penyajian format yang memungkinkan kesalahan penilaian oleh pembaca laporan. Proporsi materialitas laporan harus memasukkan, baik hasil yang diinginkan maupun tidak diinginkan, sebagaimana topik yang dapat mempengaruhi kebijakan pemangku kepentingan. Laporan harus membedakan secara jelas antara penyajian fakta dan interpretasi organisasi terhadap informasi.	<ol style="list-style-type: none"> Aspek positif terdapat dalam laporan. Aspek negatif tidak dipaparkan dalam laporan. 	Tidak memenuhi prinsip keseimbangan
Dapat	Perbandingan sangat dibutuhkan	1. Format	Tidak

<p>diperbandingkan : Isu-isu dan informasi harus dipilih, dikumpulkan, dan dilaporkan secara konsisten. Informasi yang dilaporkan harus disajikan dalam sebuah cara yang memungkinkan pemangku kepentingan dapat menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu dan dapat mendukung analisis relatif terhadap organisasi lainnya</p>	<p>dalam mengevaluasi kinerja. Pemangku kepentingan yang menggunakan laporan harus dapat membandingkan informasi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dilaporkan dengan kinerja organisasi sebelumnya, sarannya, dan apabila memungkinkan dengan kinerja organisasi lainnya. Konsistensi dalam melaporkan memungkinkan pihak-pihak internal dan eksternal untuk membandingkan kinerja dan menilai kemajuan sebagai bagian dari pemberian peringkat, keputusan investasi, advokasi program, dan aktivitas lainnya.</p>	<p>laporan berbeda dari tahun ke tahun. 2. Kegiatan CSR BSM mengalami kemajuan. Namun, tidak dapat mengidentifikasi dengan jelas mengenai perkembangan tersebut terkait informasi, ruang lingkup CSR dari tahun ke tahun.</p>	<p>memenuhi prinsip dapat diperbandingkan.</p>
<p>Kecermatan : Informasi yang dilaporkan harus cukup cermat dan detail bagi pemangku kepentingan dalam menilai kinerja organisasi</p>	<p>Tanggapan terhadap topik dan indikator ekonomi, lingkungan dan sosial dapat diekspresikan dalam berbagai cara, mulai dari tanggapan secara kualitatif sampai kepada pengukuran kuantitatif secara detail. Karakteristik yang menentukan ketepatan adalah berbeda berdasarkan sifat dari informasi serta pengguna informasi. Sebagai contoh, ketepatan dari informasi kualitatif sangat ditentukan oleh tingkatan kejelasan, detail, dan keseimbangan penyajian laporan dalam Batasan Laporan yang tepat. Sebaliknya, ketepatan dari informasi kuantitatif akan sangat tergantung pada metode khusus yang digunakan dalam memperoleh, mengkompilasi dan menganalisis data.</p>	<p>1. Informasi disajikan secara ringkas dan singkat. 2. Laporan hanya sebatas kulit kegiatan saja.</p>	<p>Tidak sesuai dengan prinsip kecermatan.</p>
<p>Ketepatan waktu : Laporan dilakukan berdasarkan jadwal sosial serta informasi kepada pemangku kepentingan tersedia tepat waktu ketika dibutuhkan</p>	<p>Kegunaan informasi akan sangat terkait dengan apakah waktu pengungkapannya kepada pemangku kepentingan dapat memungkinkan mereka untuk mengintegrasikannya secara efektif dalam pembuatan kebijakan yang mereka lakukan. Waktu rilis merujuk kepada baik pelaporan rutin maupun</p>	<p>1. Setiap kegiatan CSR memiliki liputan dari cabang yang melaksanakan. 2. Dilaporkan tidak lama setelah</p>	<p>Memenuhi prinsip ketepatan waktu.</p>

dalam mengambil kebijakan.	kedekatannya dengan peristiwa 117ocial yang digambarkan dalam laporan. Meskipun aliran konstan informasi diinginkan untuk berbagai tujuan, organisasi harus menyediakan secara rutin sebuah pengungkapan yang terkonsolidasi mengenai kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial pada waktu tertentu. Konsistensi dalam frekuensi laporan dan lamanya periode laporan juga dibutuhkan untuk menjamin dapat dibandingkannya informasi dari waktu ke waktu serta aksesibilitas laporan kepada pemangku kepentingan.	kegiatan CSR berlangsung karena memiliki laporan pertanggungjawaban kegiatan.	
Kejelasan : Informasi harus disediakan dalam cara yang dapat dimengerti dan diakses oleh pemangku kepentingan yang menggunakan laporan	Laporan harus menyajikan informasi dalam cara yang dapat dimengerti, dapat diakses, dan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan organisasi (baik dalam bentuk cetak maupun saluran lainnya). Pemangku kepentingan harus dapat menemukan informasi yang dibutuhkan tanpa harus bekerja keras. Informasi harus disajikan dalam cara yang komprehensif kepada pemangku kepentingan yang telah memiliki pemahaman akan organisasi dan aktivitasnya. Grafik dan tabel data terkonsolidasi dapat membantu dalam memahami dan mengakses informasi yang ada dalam laporan. Tingkat pengumpulan informasi juga dapat mempengaruhi kejelasan sebuah laporan jika informasi kurang atau lebih detail dari yang diharapkan pemangku kepentingan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi disajikan dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami 2. Dapat diakses karena dipublikasikan di <i>official web</i> BSM 3. Informasi disajikan pula dalam bentuk tabel dan foto kegiatan 	Memenuhi prinsip kejelasan.
Keterandalan : Informasi dan proses yang digunakan dalam penyiapan laporan harus dikumpulkan, direkam, dikompilasi, dianalisis, dan diungkapkan dalam sebuah cara yang dapat diuji dan	Pemangku kepentingan harus yakin bahwa sebuah laporan dapat dicek ketepatan dan ketelitian isinya serta tingkatan Prinsip Pelaporan yang digunakan. Informasi dan data yang termasuk dalam laporan harus didukung oleh pengendalian internal atau dokumentasi yang dapat di-review oleh individu di luar mereka yang terlibat dalam pembuatan laporan. Kinerja yang tidak didukung bukti yang memadai tidak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi kegiatan direkam, dikumpulkan dalam liputan kegiatan CSR yang diterbitkan dalam bentuk majalah LAZNAS tiap bulannya. 	Cukup memenuhi prinsip keterandalan.

dapat membentuk kualitas dan materialitas dari laporan.	perlu diungkapkan dalam laporan, kecuali jika menunjukkan informasi materialitas serta laporan memberikan penjelasan yang tidak ambigu terhadap semua ketidakpastian informasi.	2. Bukti kegiatan cukup memadai karena selain kantor pusat, tiap cabang juga memegang bukti kegiatan untuk masing-masing cabang.	
---	---	--	--

Tabel 4.2.2 (1)

Ringkasan Analisis Laporan CSR BSM terhadap prinsip laporan CSR dari GRI

Laporan CSR BSM dalam penyajiannya harus mengikuti 6 prinsip laporan CSR menurut GRI. Peneliti menelaah laporan tahunan manajemen BSM dari tahun awal pelaksanaan CSR sampai dengan tahun 2010. Hasil dari analisis telah dipaparkan pada tabel diatas dan akan dibahas secara lebih detail untuk setiap prinsipnya.

Laporan CSR BSM hanya menyajikan aspek positif pada laporan CSR nya. Tidak terdapat aspek negatif yang turut dicantumkan didalamnya. Misalnya mengenai keberhasilan CSR. Berdasarkan hasil wawancara, tidak seluruh kegiatan CSR memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat maupun lingkungan, namun didalam laporan hanya terdapat gambaran umum kegiatan dan dana yang dikeluarkan. Dapat dikatakan bahwa laporan CSR BSM masih belum memenuhi prinsip keseimbangan.

BSM belum memiliki konsistensi dalam melaporkan program CSR tiap tahunnya. Oleh sebab itu sangat sulit untuk dibandingkan perkembangan kualitas dari

tahun sebelumnya dengan tahun selanjutnya karena perbedaan format informasi yang disajikan. Selain itu, sebenarnya terdapat perkembangan kualitas kegiatan CSR dari tahun ke tahun namun tidak dapat diidentifikasi dengan jelas dimana perbedaan tersebut dalam laporan CSR BSM. Peneliti menyimpulkan bahwa prinsip dapat dibandingkan belum terdapat pada laporan CSR BSM.

Kecermatan dalam laporan CSR pun dirasa kurang karena kegiatan tidak dilaporkan secara detail dan seimbang seperti yang disimpulkan sebelumnya. Laporan kegiatan hanya dibahas sebatas kulitnya saja. Hal ini dapat menyebabkan para pemangku kepentingan tidak bisa menilai kinerja organisasi dengan baik. Oleh sebab itu, laporan CSR BSM dapat dikatakan tidak memenuhi prinsip kecermatan.

BSM dinilai memenuhi prinsip ketepatan waktu dalam pencatatan laporan CSR nya. Hal ini merujuk kepada keterangan yang diberikan oleh mantan bagian accounting BSM cabang utama Bandung bahwa setiap kegiatan CSR dibuat liputan dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Informasi yang disajikan pihak BSM dalam laporan CSR mudah dimengerti karena menggunakan bahasa yang ringan dan tertata. Dapat diakses karena laporan CSR ini dipublikasikan di *official web* BSM sehingga mudah untuk menemukannya. Informasi juga disajikan dalam bentuk tabel dan foto agar mudah untuk memahami kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa laporan CSR memenuhi prinsip kejelasan.

Laporan CSR pada BSM dapat dikatakan cukup diandalkan karena setiap cabang maupun kantor pusat memiliki bukti kegiatan yang terangkum dalam LPJ kegiatan CSR. Selain itu, liputan kegiatan juga di publikasikan di Majalah LAZNAS BSM tiap bulannya sebagai bukti.

Mengenai kesesuaian laporan CSR dengan ketentuan GRI dan dibandingkan dengan laporan CSR perusahaan yang mendapat Indonesian Sustainability Report Awards (ISRA) untuk kategori kelompok C (meliputi perusahaan-perusahaan dalam industri: Jasa Keuangan, Infra struktur, utilitas dan transportasi, serta Perdagangan, jasa dan investasi) dapat dilihat pada table dibawah.

Indeks GRI	Item yang diperlukan di GRI	Laporan CSR perusahaan yang mendapat ISRA untuk kelompok C	Analisis laporan CSR BSM	Kesimpulan
1.1	Pernyataan dari pejabat pengambil keputusan paling senior dalam Perseroan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan perkembangan perusahaan dari tahun lalu 2. Menyatakan komitmennya dalam peningkatan pelaksanaan CSR 3. Bertekad meningkatkan standar tata kelola perusahaan 4. Mengungkapkan posisi stakeholder bagi perusahaan 	-	Tidak memenuhi kriteria
1.2	Deskripsi atas dampak, risiko dan peluang utama.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan tantangan 	-	Tidak memenuhi

		<p>bisnis perusahaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyatakan diri kompeten untuk bersaing 3. Menjabarkan resiko perusahaan 		kriteria
2.1	Nama Perseroan	Menyebutkan nama lengkap perusahaan	-	Tidak memenuhi kriteria
2.2	Merek, produk, dan/atau layanan unggulan.	Menyebutkan satu persatu produk/layanan perusahaan dengan memberikan gambaran mengenai	-	Tidak memenuhi kriteria
2.3	Struktur operasional Perseroan, termasuk divisi utama, perusahaan yang beroperasi, anak perusahaan dan perusahaan <i>joint venture</i> .	-	-	Tidak memenuhi kriteria
2.4	Lokasi kantor pusat Perseroan.	Lokasi kantor pusat dicantumkan	-	Tidak memenuhi kriteria
2.5	Jumlah negara di mana Perseroan beroperasi, dan nama negara dengan operasi utama atau yang sangat terkait dengan isu-isu keberlanjutan yang dicakup dalam laporan.	Menyebutkan nama Negara yang terkait dengan keberlanjutan	Menyebutkan nama Negara yang terkait dengan isu keberlanjutan	Memenuhi kriteria
2.6	Kondisi kepemilikan dan perusahaan hukum.	Menyebutkan siapa pemegang saham mayoritas dan dimana saja saham diperdagangkan	-	Tidak memenuhi kriteria
2.7	Pelayanan pasar.	Memaparkan skala pelayanan pasar	-	Tidak memenuhi kriteria
2.8	Skala organisasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memaparkan jumlah pegawai berdasarkan usia 2. Menggambar kan peningkatan pendapatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan peningkatan jumlah pegawai 2. Mencantumkan peningkatan pendapatan 	Bisa dikatakan memenuhi kriteria, walaupun kurang detail

		dan jumlahnya 3. Menyertakan jumlah modal dan rinciannya		
2.9	Perubahan signifikan selama masa pelaporan terkait ukuran, struktur atau kepemilikan.	Mencantumkan peristiwa perubahan susunan anggota dewan komisaris dan direksi perseroan	-	Tidak memenuhi kriteria
2.10	Penghargaan yang diterima dalam masa pelaporan.	Menjabarkan beberapa penghargaan penting yang diraih perusahaan	-	Tidak memenuhi kriteria
3.1	Masa Pelaporan (misalnya tahun <i>fiscal</i> /kalender) untuk informasi yang disediakan.	Menyebutkan masa pelaporan untuk setiap informasi yang disediakan	Menyebutkan masa pelaporan untuk setiap informasi yang disediakan	Memenuhi kriteria
3.2	Tanggal laporan yang paling baru, sebelumnya, (jika ada).	Tanggal 31 Desember 2010 merupakan tanggal yang paling baru	Tanggal 23 Desember merupakan tanggal yang paling baru	Memenuhi kriteria
3.3	Siklus pelaporan (tahunan, dwi tahunan, dll.).	Siklus laporan tahunan	Siklus laporan tahunan	Memenuhi kriteria
3.4	Pusat kontak untuk menyampaikan pertanyaan seputar laporan atau isinya.	Dicantumkan	-	Tidak memenuhi kriteria
3.5	Proses untuk menentukan isi laporan.	Menjabarkan secara ringkas proses penentuan isi laporan	-	Tidak memenuhi kriteria
3.6	Lingkup bahasan laporan.	Disebutkan pada kata pendahuluan laporan	-	Tidak memenuhi kriteria
3.7	Penjelasan batasan khusus atas cakupan atau lingkup bahasan laporan.	Hanya disebutkan mengenai batasan khusus lingkup bahasan laporan	-	Tidak memenuhi kriteria
3.8	Teknik pengukuran data dan dasar-dasar perhitungan.	Disebutkan pada pendahuluan laporan	-	Tidak memenuhi kriteria
3.9	Dasar bagi pelaporan perusahaan <i>joint venture</i> , anak perusahaan, fasilitas yang disewa, operasi yang sifatnya <i>outsorce</i> , dan entitas lain.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
3.10	Penjelasan dampak dari pengungkapan kembali	-	-	Tidak memenuhi kriteria

	informasi yang terdapat dalam laporan-laporan sebelumnya.			kriteria
3.11	Perubahan signifikan dari masa pelaporan sebelumnya.	Menyertakan perubahan dari masa pelaporan sebelumnya	Menyertakan perubahan dari masa pelaporan sebelumnya	Memenuhi kriteria
3.12	Tabel yang mengidentifikasi lokasi Standar.	Infomasi terkait tidak dirangkum dalam bentuk tabel	-	Tidak memenuhi kriteria
3.13	Kebijakan dan praktik berjalan seiring upaya mencari dukungan kepercayaan eksternal terhadap laporan tersebut.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
4.1	Struktur tata kelola Perseroan.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
4.2	Indikasi mengenai apakah Ketua badan tata kelola yang tertinggi juga merupakan seorang eksekutif.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
4.3	Bagi organisasi yang memiliki struktur dewan gabungan, jumlah anggota badan tata kelola tertinggi yang independen dan/atau anggota noneksekutif.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
4.4	Mekanisme bagi para pemegang saham dan karyawan untuk memberikan rekomendasi atau keputusan kepada badan tata kelola tertinggi.	Tidak dijabarkan tapi keterlibatannya disebutkan	-	Tidak memenuhi kriteria
4.5	Hubungan antara kompensasi bagi anggota badan tata kelola tertinggi, manajer senior, dan eksekutif (termasuk pengaturan pemberangkatan), dan kinerja organisasi (termasuk kinerja sosial dan lingkungan).	-	-	Tidak memenuhi kriteria
4.6	Penerapan proses bagi badan tata kelola tertinggi untuk menjamin penghindaran konflik kepentingan.	Menyatakan bahwa perusahaan menerapkannya	-	Tidak memenuhi kriteria
4.7	Proses menentukan	-	-	Tidak

	kualifikasi dan keahlian anggota badan tata kelola tertinggi untuk mengarahkan strategi Perseroan terkait topik-topik ekonomi, lingkungan dan sosial.			memenuhi kriteria
4.8	Pernyataan yang dikembangkan secara internal terkait misi atau nilai-nilai perusahaan, standar pelaksanaan, dan prinsip-prinsip terkait kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial.	Tertera pada laporan mengenai informasi tersebut		Tidak memenuhi kriteria
4.9	Prosedur badan tata kelola tertinggi untuk mengawasi pengidentifikasian dan pengelolaan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial Perseroan.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
4.10	Proses evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi itu sendiri.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
4.11	Penjelasan mengenai apa dan bagaimana pendekatan atau prinsip pencegahan dilakukan oleh Perseroan	Terdapat penjelasannya di beberapa bahasan	-	Tidak memenuhi kriteria
4.12	Kesepakatan, prinsip atau inisiatif lainnya yang dikembangkan secara eksternal terkait bidang ekonomi, lingkungan dan sosial di mana Perseroan menjadi anggota atau mendukung.	Tercantum pada bagian tertentu	-	Tidak memenuhi kriteria
4.13	Keanggotaan di asosiasi (seperti asosiasi industri) dan/atau organisasi advokasi internasional/nasional.	Tercantum di beberapa pembahasan	Disebutkan dalam bentuk tabel	Memenuhi kriteria
4.14	Daftar kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan oleh Perseroan	Ada. Dibuat dalam bentuk tabel	-	Tidak memenuhi kriteria
4.15	Dasar untuk mengidentifikasi Pemilihan pemangku kepentingan dengan siapa	Disebut dalam paragraph setelah tabel pemangku kepentingan	Ada di kata pendahuluan	Memenuhi kriteria

	yang akan Terlibat			
4.16	Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk frekuensi keterlibatan berdasarkan jenis dan kelompok pemangku kepentingan.	Hanya menyebutkan metode keterlibatan dan harapan pemangku kepentingan	-	Tidak memenuhi kriteria
4.17	Topik bahasan utama yang dimunculkan melalui keterlibatan pemangku kepentingan, dan bagaimana Perseroan merespon terhadap topik bahasan utama tersebut, termasuk melalui pelaporannya	Membahas sekilas mengenai topik bahasan utama, respon ditulis dalam laporan tiap bahasan	-	Tidak memenuhi kriteria
EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan dibagikan, termasuk pendapatan, beban usaha, kompensasi bagi karyawan, donasi dan investasi lain di masyarakat, laba ditahan, dan pembayaran terhadap penyedia modal dan pemerintah.	Tercantum pada laporan	-	Tidak memenuhi kriteria
EC2	Implikasi finansial dan risiko dan peluang lain bagi kegiatan Perseroan terkait perubahan iklim.	Disebut dan dijelaskan pada laporan	-	Tidak memenuhi kriteria
EC3	Cakupan kewajiban rencana pemberian manfaat Perseroan.	Ada. Disebutkan	-	Tidak memenuhi kriteria
EC4	Bantuan keuangan yang signifikan yang berasal dari pemerintah.	Ada. Dicantumkan dalam laporan	-	Tidak memenuhi kriteria
EC5	Kisaran rasio standar gaji bagi tingkat karyawan baru dibandingkan gaji minimum setempat di lokasi usaha yang signifikan.	Tidak disebutkan rasionya, hanya jenis gaji yang diperoleh dan metode menentukan jumlahnya	-	Tidak memenuhi kriteria
EC6	Kebijakan, praktik, dan proporsi pembelanjaan untuk pemasok lokal di lokasi usaha yang signifikan.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
EC7	Prosedur perekrutan lokal	-	-	Tidak

	dan proporsi manajemen senior yang direkrut dari masyarakat setempat di lokasi usaha yang signifikan.			memenuhi kriteria
EC8	Pembangunan dan dampak dari investasi atas infrastruktur dan jasa yang disediakan untuk kepentingan publik melalui keterlibatan komersial atau <i>pro bono</i> .	Hanya penjelasan dimana infrastruktur dan jasa dibangun	-	Tidak memenuhi kriteria
EC9	Pemahaman dan penjelasan dampak perekonomian yang tidak langsung, termasuk cakupan dari dampak tersebut	Hanya penjelasan dan tersebar di laporan	-	Tidak memenuhi kriteria
EN1	Material yang digunakan berdasarkan bobot atau volume	Hanya menyebutkan penanganan material yang sudah tidak dipergunakan	-	Tidak memenuhi kriteria
EN2	Persentase material yang termasuk material input daur ulang.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
EN3	Konsumsi energi langsung oleh sumber energi utama	Disebutkan	-	Tidak memenuhi kriteria
EN4	Konsumsi energi tidak langsung oleh sumber utama	Disebutkan	-	Tidak memenuhi kriteria
EN5	Penghematan energi terkait pelestarian dan peningkatan efisiensi.	Disebutkan	-	Tidak memenuhi kriteria
EN6	Inisiatif untuk menyediakan produk dan jasa yang hemat energi atau berbasis energy terbarukan, serta pengurangan kebutuhan energi akibat penerapan inisiatif tersebut.	Ada	-	Tidak memenuhi kriteria
EN7	Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan mencapai pengurangan energi.	Ada	-	Tidak memenuhi kriteria
EN8	Total pengumpulan air pada sumber.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
EN9	Sumber air yang secara	Disebutkan	-	Tidak

	signifikan terpengaruh oleh pengumpulan air tersebut.			memenuhi kriteria
EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan dimanfaatkan kembali	-	-	Tidak memenuhi kriteria
EN11	Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewakan, dikelola, atau berdekatan dengan, lahan yang dilindungi serta lahan yang memiliki nilai keragaman hayati tinggi yang berada di luar area lahan yang dilindungi.	Disebutkan bahwa perusahaan tidak memiliki lahan pada area yang dilindungi keanekaragaman hayati	-	Tidak memenuhi kriteria
EN12	Penjelasan dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa atas keragaman hayati di areal lahan yang dilindungi dan area lahan dengan nilai keragaman hayati tinggi yang berada di luar area lahan yang dilindungi.	Tidak ada karena tidak memiliki lahan disana	-	Tidak memenuhi kriteria
EN13	Habitat yang dilindungi atau diperbaiki.	Disebut jenis programnya	Disebut jenis programnya	Memenuhi kriteria
EN14	Strategi, kegiatan berjalan, dan rencana masa depan untuk pengelolaan dampak terhadap keragaman hayati.	Disebutkan jenis programnya	-	Tidak memenuhi kriteria
EN15	Jumlah spesies yang masuk daftar merah IUCN dan spesies yang masuk daftar konservasi nasional dengan habitat yang terancam oleh kegiatan operasional Perseroan dan tingkat risiko kepunahan.	Tidak ada karena tidak berhubungan	-	Tidak memenuhi kriteria
EN16	Total emisi gas rumah kaca yang langsung maupun tidak langsung berdasarkan bobotnya.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
EN17	Emisi gas rumah kaca yang relevan lainnya berdasarkan bobot.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
EN18	Inisiatif untuk mengurangi emisi gas	Disebutkan jumlah pengurangan tiap	-	Tidak memenuhi

	rumah kaca dan pencapaian pengurangan emisi.	tahunnya		kriteria
EN19	Emisi substansi yang mengurangi lapisan ozon berdasarkan bobot	Tidak disebutkan bobotnya	-	Tidak memenuhi kriteria
EN20	NO, SO, dan emisi udara lainnya yang signifikan berdasarkan jenis dan bobot.	Tidak disebutkan bobotnya	-	Tidak memenuhi kriteria
EN21	Total pembuangan air berdasarkan kualitas dan destinasi	-	-	Tidak memenuhi kriteria
EN22	Total bobot sampah berdasarkan jenis dan metode pembuangannya.	Hanya menyebutkan metode pembuangannya	-	Tidak memenuhi kriteria
EN23	Total jumlah dan volume air yang terbuang secara signifikan.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
EN24	Bobot sampah berbahaya yang dipindahkan, diimpor, diekspor, atau dikelola berdasarkan peraturan <i>Basel Convention Annex I, II, III, dan VIII</i> , serta persentase sampah yang dipindahkan secara internasional.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
EN25	Identitas, besaran, status yang terlindungi, dan nilai keragaman hayati dari kumpulan air dan habitat terkait yang terpengaruh secara signifikan oleh pembuangan air yang dilakukan organisasi pembuat.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
EN26	Inisiatif untuk mengurangi dampak produk dan jasa terhadap lingkungan, serta cakupan pengurangan dampak tersebut.	Hanya menyebutkan inisiatifnya	-	Tidak memenuhi kriteria
EN27	Persentase produk yang dijual dan bahan kemasan yang reklamasi berdasarkan kategori.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
EN28	Nilai keuangan terkait denda yang signifikan dan total jumlah sanksi non-	Tidak terkait dengan peraturan dan undang-undang tersebut	-	Tidak memenuhi kriteria

	keuangan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-perundangan lingkungan.	karena tidak berada dalam koridor tersebut		
EN29	Dampak terhadap lingkungan yang signifikan dari produk transportasi dan barang dan material lain untuk operasional Perseroan, dan anggota tenaga kerja transportasi	-	-	Tidak memenuhi kriteria
EN30	Total pendanaan dan investasi perlindungan terhadap lingkungan berdasarkan jenis	Ada disebutkan dalam bentuk tabel	-	Tidak memenuhi kriteria
LA1	Total tenaga kerja berdasarkan tipe perekrutan, kontrak, dan wilayah.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
LA2	Total jumlah dan tingkat pendapatan tenaga kerja berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
LA3	Manfaat yang diberikan terhadap karyawan tetap yang tidak diberikan bagi karyawan kontrak atau karyawan paruh waktu, berdasarkan jenis usaha yang besar.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
LA4	Persentase tenaga kerja yang dicakup perjanjian bersama.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
LA5	Masa pemberian teguran minimum terkait perubahan operasional, termasuk apakah ini tercantum dalam perjanjian bersama.	Tercantum dalam perjanjian bersama	-	Tidak memenuhi kriteria
LA6	Persentase tenaga kerja total yang terwakili dalam komite bersama kesehatan dan keselamatan pekerjaan manajemen sentage yang akan membantu mengawasi dan memberikan saran atas program-program kesehatan dan	-	-	Tidak memenuhi kriteria

	keselamatan kerja.			
LA7	Tingkat luka yang dialami, penyakit dalam bekerja, cuti dan absen kerja, dan jumlah fasilitas kerja per wilayah.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
LA8	Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pencegahan, dan pengendalian risiko yang diterapkan untuk membantu anggota tenaga kerja, keluarganya, serta anggota masyarakat terkait penyakit serius yang diderita.	Tercantum program pendidikan dan pelatihan ,pencegahan dan pengendalian resiko terhadap tenaga kerja pada laporan	Tercantum program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Membantu masyarakat terkait dengan penyakit.	Memenuhi kriteria
LA9	Topik bahasan terkait kesehatan dan keselamatan yang dicakup dalam perjanjian resmi dengan serikat dagang.	Ada dibahas sekilas	-	Tidak memenuhi kriteria
LA10	Waktu pelatihan rata-rata per kategori karyawan	-	-	Tidak memenuhi kriteria
LA11	Program bagi manajemen keahlian dan pembelanjaran selama hidup yang mendukung kelanjutan perekrutan karyawan dan membantu mereka dalam mengelola akhir karir mereka.	Dibahas pada laporan	-	Tidak memenuhi kriteria
LA12	Persentase karyawan yang menerima evaluasi pengembangan karir dan kinerja secara teratur.	Disebutkan jumlahnya untuk berbagai program	-	Tidak memenuhi kriteria
LA13	Komposisi badan tata kelola dan perincian karyawan per kategori berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator terkait keragaman lainnya	Disebutkan berdasarkan kelompok usia dan pendidikan	-	Tidak memenuhi kriteria
LA14	Rasio gaji pokok karyawan laki-laki terhadap karyawan perempuan berdasarkan kategori karyawan.	-	-	Tidak memenuhi kriteria

HR1	Persentase dan jumlah total perjanjian investasi yang signifikan yang memasukkan klausul atau telah menjalani pemeriksaan terhadap sumber daya manusia.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
HR2	Persentase pemasok dan kontraktor yang signifikan yang telah melalui pemeriksaan terkait sumber daya manusia dan tindakan yang telah diambil	-	-	Tidak memenuhi kriteria
HR3	Total waktu yang digunakan karyawan untuk menjalani pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur tentang aspek sumber daya manusia yang relevan dengan operasional, termasuk persentase karyawan yang sudah mengikuti pelatihan.	Tercantum persentase karyawan yang sudah mengikuti pelatihan	-	Tidak memenuhi kriteria
HR4	Total jumlah peristiwa diskriminasi dan tindakan yang diambil.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
HR5	Operasional yang diidentifikasi di mana hak untuk menguji kebebasan asosiasi dan perjanjian bersama kemungkinan menghadapi risiko besar, dan tindakan diambil untuk mendukung hak tersebut.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
HR6	Operasional yang diidentifikasi mempunyai risiko signifikan terhadap kegiatan pemanfaatan anak-anak sebagai pekerja, dan tindakan untuk mendukung penghapusan tenaga kerja anak-anak.	-	Menyatakan diri untuk tidak mempekerjakan anak-anak	Cukup memenuhi kriteria, walaupun tidak menjelaskan mengenai semua aspek yang diminta
HR7	Operasional Perseroan yang diidentifikasi berdampak signifikan terhadap tenaga kerja	-	Menyatakan diri untuk tidak menggunakan tenaga kerja paksa	Cukup memenuhi kriteria, walaupun

	paksa, dan tindakan yang diambil untuk mendukung penghapusan tenaga kerja paksa.			tidak menjelaskan mengenai semua aspek yang diminta
HR8	Persentase tenaga kerja keamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur perusahaan mengenai aspek-aspek sumber daya manusia yang relevan dengan operasionalnya.	Tercantum dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih	-	Tidak memenuhi kriteria
HR9	Total jumlah peristiwa pelanggaran hak masyarakat lokal dan tindakan yang diambil		-	Tidak memenuhi kriteria
SO1	Kondisi, cakupan, dan keefektifan program dan praktik yang mengevaluasi dan mengelola dampak operasional terhadap masyarakat, termasuk kegiatan pemasukan, pelaksanaan, dan pengeluaran.	Terdapat dalam laporan kontribusi bagi komunitas	-	Tidak memenuhi kriteria
SO2	Persentase dan total jumlah unit usaha yang dianalisa risikonya terkait kegiatan korupsi.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
SO3	Persentase karyawan yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur anti korupsi Perseroan. Percentage	-	-	Tidak memenuhi kriteria
SO4	Tindakan yang diambil untuk merespon kegiatan korupsi	Dibahas dalam laporan kebijakan publik	-	Tidak memenuhi kriteria
SO5	Posisi kebijakan publik dan partisipasi dalam pengembangan kebijakan publik serta <i>lobbying</i> .	Perusahaan ikut dalam pengembangan kebijakan publik	-	Tidak memenuhi kriteria
SO6	Total nilai kontribusi keuangan dan <i>in-kind</i> kepada partai politik, politisi, dan lembaga terkait per Negara	Tidak terlibat dalam kegiatan politik	-	Tidak memenuhi kriteria
SO7	Total jumlah kegiatan hukum yang	Hanya disebutkan bahwa praktek	-	Tidak memenuhi

	menunjukkan tingkah laku antipersaingan, anti kartel, dan praktik-praktik monopoli, serta hasilnya.	pelanggaran masih tetap ada yang melakukan		kriteria
SO8	Nilai keuangan dari denda yang signifikan serta total jumlah sanksi nonkeuangan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan	Tidak disebutkan nilai keuangan dari denda tersebut	-	Tidak memenuhi kriteria
PR1	Tingkat siklus hidup di mana dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa dievaluasi demi perbaikan, dan persentase kategori produk dan jasa yang signifikan terhadap prosedur.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
PR2	Total jumlah peristiwa ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kode-kode umum terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa selama siklus hidup mereka, berdasarkan jenis hasilnya.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diperlukan berdasarkan prosedur, dan persentase produk dan jasa yang signifikan terkait kebutuhan informasi semacam itu.	Memuat penjelasan tentang produk	-	Tidak memenuhi kriteria
PR4	Total jumlah peristiwa ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kode-kode umum yang terkait informasi produk dan jasa serta pelabelan, berdasarkan jenis hasilnya.	Hanya dijelaskan mengenai tindakan apabila terjadi keluhan	-	Tidak memenuhi kriteria
PR5	Praktik-praktik terkait kepuasan pelanggan, termasuk hasil survei yang mengukur tingkat kepuasan pelanggan	Hasil survei mengenai tingkat kepuasan pelanggan dicantumkan dalam laporan	-	Tidak memenuhi kriteria
PR6	Program terkait kepatuhan	Dibahas pada laporan	-	Tidak

	terhadap perundang-undangan, standar, dan kode-kode umum terkait komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan sponsor.	mengenai penetapan tariff penyediaan layanan telekomunikasi dan tariff jaringan telekomunikasi		memenuhi kriteria
PR7	Total jumlah peristiwa ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kode-kode sosial terkait komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi dan sponsor berdasarkan jenis hasilnya.	-	-	Tidak memenuhi kriteria
PR8	Total jumlah keluhan substansial terkait pelanggaran kerahasiaan pelanggan dan kehilangan data pelanggan.	Hanya disebutkan program perlindungan kerahasiaan konsumen dan calon pelanggan	-	Tidak memenuhi kriteria
PR9	Nilai keuangan terkait denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap perundangundangan dan peraturan mengenai provisi dan penggunaan produk dan jasa.	-	-	Tidak memenuhi kriteria

Tabel 4.2.2 (2)
Analisis Laporan CSR BSM terhadap indikator GRI

Setelah menganalisis laporan CSR BSM dan laporan perusahaan yang memperoleh ISRA untuk kelompok C (perusahaan X) berdasarkan indikator laporan CSR dari GRI, diketahui bahwa mutu dari laporan CSR BSM masih jauh dibawah laporan perusahaan tersebut. Laporan CSR dari GRI memiliki tiga indikator dimana dari tiga indikator tersebut diperinci lagi menjadi 121 item yang sudah termasuk strategi dan profil perusahaan. Tapi itu belum termasuk indikator spesifik dibidang perbankan karena tiap-tiap perusahaan memiliki bidang yang berbeda sehingga

mereka harus melaporkan hal tersebut. Indikator-indikator dari GRI tersebut sudah mencakup :

A. Strategi dan profil perusahaan :

1. Strategi dan Analisis
2. Profil Organisasi
3. Parameter Laporan
4. Tata kelola, komitmen, dan keterlibatan
5. Pendekatan manajemen dan kinerja indikator

B. Ekonomis (EC)

C. Lingkungan (EN)

D. Sosial :

1. Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan Layak (LA)
2. Hak Asasi Manusia (HR)
3. Masyarakat (SO)
4. Tanggung Jawab produk (PR)

E. Indikator Spesifik Perbankan

Indikator pertama yang ada pada laporan yaitu strategi dan profil, dimana dalam indikator ini harus dijelaskan strategi dan analisis yang berisi pernyataan dari CEO mengenai relevansi keberlanjutan terhadap perusahaan dan strateginya, dan deskripsi dampak, risiko dan peluang utama yang berpengaruh terhadap perusahaan, keberlanjutan jangka panjang dan kinerja keuangan. Hal-hal diatas tidak tercantum dalam laporan CSR BSM.

Indikator strategi dan profil juga membahas mengenai profil organisasi yang berisi nama perusahaan, merk, produk dan atau jasa utama sifat kepemilikan, skala organisasi (jumlah pegawai, penjualan netto, total modal, kuantitas jasa yang disediakan), perubahan signifikan yang terjadi dalam perusahaan selama periode laporan dan penghargaan yang diterima dalam periode laporan. Dalam aspek ini, BSM mencantumkan mengenai nama negara yang terkait dengan isu keberlanjutan, menyebutkan peningkatan jumlah pegawai dan peningkatan pendapatan. Selebihnya belum tercantum dalam laporan.

Aspek ketiga pada indikator strategi dan profil adalah parameter laporan yang menjelaskan profil laporan mulai dari periode laporan, tanggal dari laporan sebelumnya yang paling baru (jika ada), siklus pelaporan, alamat kontak jika ada pertanyaan mengenai laporan dan isinya; ruang lingkup laporan dan batasan laporan, index isi GRI, dan assurance. Untuk item ini, BSM menyebutkan masa pelaporan untuk setiap informasi yang disediakan, mencantumkan tanggal baru, mencantumkan perubahan dari masa pelaporan sebelumnya dan jika dilihat siklus laporan BSM adalah siklus tahunan. Selebihnya belum tercantum pada laporan CSR BSM.

Aspek keempat dari indikator strategi dan profil adalah mengenai tata kelola organisasi mulai dari status ketua dari badan pengelola, jumlah anggota badan peneglola, mekanisme pihak intern dalam menyampaikan rekomendasi atau arahan kepada badan pengelola dan topik yang muncul akibatnya, prosedur pengawasan dan proses evaluasi; komitmen terhadap inisiatif eksternal mulai dari pendekatan atau prinsip pencegahan untuk mengelola risiko dalam perencanaan operas, piagam, atau

inisiatif yang dikembangkan secara eksternal terkait ekonomi, lingkungan dan sosial; dan keterlibatan pemangku kepentingan secara umum yang dilibatkan oleh perusahaan.

Untuk aspek keempat, BSM hanya menyebutkan keanggotaan di asosiasi atau organisasi internasional maupun nasional. Kemudian menyebutkan dasar pemilihan pemangku kepentingan dengan siapa yang akan terlibat. Selebihnya belum tercantum dalam laporan CSR BSM.

Aspek terakhir dari indikator strategi dan profil adalah mengenai pendekatan manajemen dan kinerja perusahaan. Pengungkapan terhadap pendekatan manajemen harus menyediakan gambaran singkat dari pendekatan manajemen terhadap aspek yang ditetapkan pada setiap kategori indikator dalam rangka menentukan konteks dari informasi kerja. Kemudian pengungkapan indikator kinerja yang didalamnya harus diperhatikan penggunaan protokol yang tepat untuk mendampingi indikator, penyajian data, metrics, agregasi data, indikator ekonomi, lingkungan dan sosial.

Dalam laporan CSR, BSM menggunakan protokol yang tepat, penyajian datanya kadang menggunakan rasio untuk kasus tertentu. BSM juga menggunakan metrics internasional. Sedangkan untuk indikator ekonomis, lingkungan dan sosial akan diperinci satu persatu pada paragraph selanjutnya.

Dalam indikator ekonomis, perusahaan menjelaskan dampak utama perusahaan terhadap masyarakat dan aliran dana diantara pemegang kepentingan. Dalam penyampaiannya, perusahaan memberi penjelasan mengenai pendekatan manajemen yang berhubungan dengan aspek ekonomi yakni kinerja ekonomi,

kehadiran pasar, dan dampak ekonomi tidak langsung; tujuan dari kinerja ekonomi sendiri, kebijakan yang digunakan berkaitan dengan aspek ekonomis, dan informasi tambahan.

Mengenai indikator ekonomis, BSM belum mencantumkannya dalam laporan CSR mereka baik itu mengenai perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, implikasi financial dan risiko, jaminan kewajiban organisasi, bantuan signifikan dari pemerintah, rentang rasio standar upah terendah, mengenai pemasok lokal, pembangunan dan dampak infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik.

Kemudian dimensi lingkungan yang meliputi kinerja yang berhubungan dengan input (material, energi dan air) dan output (misalnya emisi, air limbah, dan limbah). Dimensi ini juga meliputi kinerja yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati, kepatuhan lingkungan, dan informasi mengenai pengeluaran lingkungan serta dampaknya terhadap produk dan jasa. Dalam penyampaiannya hampir sama dengan dimensi ekonomis namun ada tambahan mengenai tanggungjawab organisasi, pelatihan dan kesadaran, pengawasan dan tindak lanjut.

Laporan CSR BSM mengenai dimensi lingkungan ini hanya satu yang dibahas, yaitu mengenai program untuk memperbaiki habitat atau lingkungan. Selebihnya mengenai keberadaan lahan BSM pada lahan yang dilindungi dan dampaknya (jika memiliki lahan disana), jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung dan tidak langsung dalam berat, inisiatif untuk menguranginya (jika menggunakan), jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan, jumlah berat limbah

dan metode pembuangan (jika menghasilkan), inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa (jika ada), nilai moneter denda jika melanggar aspek lingkungan belum dibahas pada laporan CSR BSM.

Indikator sosial membahas sistem sosial perusahaan dimana dia beroperasi. Indikator ini menentukan aspek kinerja penting yang berhubungan dengan empat macam kategori aspek. Yang pertama berhubungan dengan ketenagakerjaan. Dalam penyampaianya, kategori ketenagakerjaan ini sama dengan dengan indikator sosial. Dalam pelaporannya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan jumlah angkatan kerja menurut beberapa segi, jumlah dan tingkat perputaran menurut berbagai segi, manfaat yang disediakan hanya untuk karyawan tetap, presentase karyawan yang dilindungi, jumlah angkatan kerja yang diwakili dalam kepanitiaan kesehatan dan keselamatan kerja, tingkat kecelakaan fisik (jika ada), program pendidikan untuk mengatasi dan mencegah kecelakaan dan penyakit, masa pelatihan, dan lain-lain.

Karena BSM bergerak dalam bidang jasa, maka pada laporan CSR nya BSM hanya mencantumkan program kesehatan rohani, club olahraga untuk kesehatan tubuh yang lelah seharian kerja. Selain itu, terdapat juga program untuk kesehatan masyarakat sekitar. Selebihnya belum tercantum dalam laporan CSR BSM.

Indikator kinerja hak asasi manusia membahas tentang hak asasi manusia dalam investasi dan pemilihan supplier/kontraktor (jika bekerjasama). Selain itu, indikator ini meliputi pelatihan mengenai hak asasi manusia bagi karyawan, aparat keamanan, seperti halnya nondikriminasi, kebebasan berserikat, tenaga kerja anak,

tenaga kerja paksa, hak adat serta kerja wajib. Dalam penyampaian laporan ini sama seperti laporan indikator kinerja lingkungan.

Dalam laporan CSR nya, BSM hanya menyatakan diri untuk tidak akan mempekerjakan tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa. Namun penjelasan lainnya seperti bentuk dukungan untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa belum ada, pelatihan berkenaan dengan hak asasi manusia mencakup tindakan diskriminasi kepada setiap karyawan dan aparat keamanan belum dicantumkan.

Indikator kinerja masyarakat memperhatikan dampak organisasi terhadap masyarakat di mana merek beroperasi, menjelaskan risiko dan interaksi dengan organisasi lainnya. Namun pada khususnya, informasi yang dibahas berhubungan dengan risiko yang diasosiasikan dengan suap, korupsi, praktek monopoli dan kolusi. Dalam penyampaian isi laporannya, sama dengan indikator sosial lainnya. Laporan CSR BSM sendiri mengenai indikator kinerja masyarakat ini belum dibahas.

Indikator kinerja tanggung jawab produk ini membahas aspek produk dari perusahaan yang melapor serta jasa yang diberikan mempengaruhi pelanggan, terutama kesehatan dan keselamatan (jika berpengaruh), informasi dan pelabelan, pemasaran dan privasi. Dalam penyampaian laporan ini, hampir sama dengan indikator lainnya.

Pada laporan CSR BSM, tidak terdapat penjelasan mengenai aspek pada kinerja produk ini baik dari segi jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur, praktek dan survey mengenai kepuasan pelanggan, program untuk

ketaatan hukum, standar dan kode voluntari yang terkait komunikasi pemasaran serta pelanggarannya (jika ada), jumlah pengaduan mengenai keleluasaan privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan, nilai moneter dari denda pelanggaran hukum.

Kemudian yang terakhir, adalah indikator khusus mengenai bidang jasa perbankan. Disini perusahaan menjelaskan lebih detail mengenai kegiatan operasi jasa perbankan yang berhubungan dengan indikator-indikator sebelumnya, yang memiliki dampak terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dan dalam laporan CSR BSM, belum tercantum mengenai indikator kinerja ini.

Jika dilihat dari laporan tahunan manajemen BSM 2010, sebenarnya ada beberapa informasi yang berkaitan dengan indikator pelaporan CSR dari GRI seperti misalnya informasi mengenai gaji, pelatihan pegawai dan jumlah yang mengikuti serta informasi mengenai produk jasa pelayanannya. Namun, karena belum ada pelaporan CSR secara khusus, maka informasi tersebut hanya tercantum pada laporan tahunan manajemen saja.

Dalam pemenuhan indikator pelaporan CSR, BSM hanya memenuhi 10% dari keseluruhan. Sedangkan, perusahaan X memenuhi 63% dari indikator laporan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa walaupun laporan BSM yang memiliki kualitas laporan diatas bank syariah yang sudah *go publik* tetapi ternyata kualitas laporannya masih jauh dibawah harapan kualitas laporan dari GRI bahkan masih jauh jika dibandingkan dengan laporan CSR perusahaan yang mengikuti ISRA.

Dapat dikatakan juga laporan CSR di Indonesia masih belum sepenuhnya mengikuti standar yang ada. Walaupun di Indonesia tidak ditentukan standar format laporan CSR, namun adanya keseragaman dalam penggunaan format laporan adalah penting karena masyarakat dapat membandingkan dengan laporan CSR dari tahun sebelumnya juga dengan laporan CSR dari para competitor. Sehingga dapat diukur dan dievaluasi sejauh mana kinerja perusahaan dalam program CSR. Dari sana lah perusahaan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Oleh sebab itu, Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia harus dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank sendiri serta memberikan pedoman bagi bank-bank syariah lainnya di segala aspek termasuk mengenai Laporan CSR. Sejalan dengan pendapat Hasibuan (2001) bahwa perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil, karena perusahaan besar akan menghadapi resiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial.

Laporan CSR BSM harus memenuhi semua indikator laporan CSR dari GRI walaupun secara bertahap karena hal ini tidak mudah apalagi jika bank tidak memiliki staf ahli atau bagian accounting yang telah mengikuti pendidikan mengenai pelaporan CSR. Selain pemenuhan indikator, BSM juga harus menyusun laporan CSR tersebut dalam tampilan yang menarik dan bahasa yang mudah dimengerti baik itu dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Serta menyertakan lembar untuk survei umpan balik pembaca laporan untuk mengetahui keberhasilan laporan CSR dalam

memberikan informasi mengenai keseriusan perusahaan dalam pembangunan keberlanjutan.

Hal ini juga demi mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dengan dibuatnya laporan CSR secara terpisah dan mulai mengikuti ajang penghargaan nasional maupun internasional akan menaikkan nama BSM sendiri maupun perbankan syariah di Indonesia. Agar publik mengetahui bahwasanya bank syariah sudah layak untuk diperhitungkan kualitasnya jika dibandingkan dengan perbankan konvensional lainnya.

